



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
RAPAT KERJA KOMISI IV DPR RI
DENGAN
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
MENGHADIRKAN KEPALA BRGM, DIRUT PERUM PERHUTANI, DIRUT
PT INHUTANI I DAN DIRUT PT INHUTANI V**

- Tahun Sidang : 2022-2023
Masa Persidangan : IV (empat)
Rapat Ke- : 5 (lima)
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Selasa, 28 Maret 2023
Waktu : Pukul 10.45 s.d. 14.30 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta
Ketua Rapat : Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP)
Acara : Membahas:
1. *Automatic Adjustment* Anggaran Tahun 2023;
2. Tindak Lanjut Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI;
dan
3. Isu-isu Aktual Lainnya.
Sekretaris Rapat : Drs. Achmad Agus Thomy/Kabag Set. Komisi IV DPR RI
Hadir : A. Anggota DPR RI:
34 dari 53 orang Anggota dengan rincian:
1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
7 dari 11 orang Anggota
1. Sudin, S.E./Ketua Komisi IV DPR RI
2. Dr. Riezky Aprilia, S.H., M.H.
3. Ono Suro, S.T.
4. Drs. I Made Urip, M.Si.
5. Dr. H. Sustrisno., S.E., M.Si.
6. Vita Ervina, S.E., M.B.A.
7. Maria Lestari, S.Pd.
2. Fraksi Partai Golongan Karya
4 dari 8 orang Anggota
1. Ir. H. Hanan A. Rozak, M.S.
2. Alien Mus

3. Teti Rohatiningsih, S.Sos.
4. Ravindra Airlangga, M.S.

3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya
4 dari 7 orang Anggota
 1. Ir. K.R.T. H. Darori Wonodipuro, M.M.
 2. Ir. H. T. A. Khalid, M.M.
 3. Dr. Ir. Endang Setyawati Thohari, D.E.S.S., M.Sc.
 4. Dr. Azikin Solthan, M.Si.

4. Fraksi Partai Nasional Demokrat
3 dari 6 orang Anggota
 1. H. Sulaeman L. Hamzah
 2. Ir. Abdullah Tuasikal
 3. Ir. Hj. Sri Kustina

5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
5 dari 5 orang Anggota
 1. Anggia Erma Rini, M.K.M./Wakil Ketua Komisi IV DPR RI
 2. H. Muhtarom, S.Sos.
 3. Daniel Johan, S.E., M.M.
 4. Drs. H. Ibnu Multazam
 5. Edward Tanur, S.H.

6. Fraksi Partai Demokrat
3 dari 5 orang Anggota
 1. Dr. Suhardi Duka, M.M.
 2. Drs. H. Guntur Sasono, M.Si.
 3. Hj. Nur'aeni, S.Sos, M.Si.

7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
4 dari 5 orang Anggota
 1. drh. H. Slamet.
 2. Dr. Hermanto, S.E., M.M.
 3. H. Johan Rosihan, S.T.
 4. Saadiah Uluputty, S.T.

8. Fraksi Partai Amanat Nasional
4 dari 4 orang Anggota
 1. H. Muhammad Syafrudin, S.T., M.M.
 2. Haerudin, S.Ag., M.H.
 3. Ir. Alimin Abdullah
 4. Daeng Muhammad, S.E., M. Si.

9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
0 dari 2 orang Anggota

B. Anggota Izin

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

- 1) H. Sunarna, S.E., M.Hum.
- 2) Ir. Mindo Sianipar
- 3) Yohanis Fransiskus Lema, S.IP.,
M.Si.

C. Pemerintah:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Prof. Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc.);
2. Sekretaris Jenderal sekaligus Plt. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M.);
3. Inspektur Jenderal (Ir. Laksmi Wijayanti, MCP.);
4. Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (Ir. Dyah Murtiningsih, M.Hum.);
5. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun. (Rosa Vivien Ratnawati, S.H., M.Sc);
6. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., M.P.M.);
7. Plt. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (Dr. Ir. Ruandha Agung Sugardiman, M.Sc.)
8. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ir. Ary Sudijanto, M.S.E.);
9. Plt. Kepala Badan Penyuluh dan Pengembangan SDM (Drs. Ade Palguna Ruteka);
10. Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (Ir. Hartono, M.Sc.)
11. Direktur Utama Perum Perhutani (Wahyu Kuncoro);
12. Direktur Utama PT Inhutani I (Oman Suherman; dan
13. Kuasa Direktur Utama/SEVP Perencanaan dan Pemasaran PT Inhutani V (Dadhut Sujanto).

Jalannya Rapat:

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Salam sejahtera untuk kita semua,
Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
Yang terhormat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan beserta jajaran,
Yang terhormat Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove beserta jajaran,
Yang terhormat Direktur Utama Perum Perhutani beserta jajaran, serta
Direktur Utama PT Inhutani I, Direktur Utama PT Inhutani V, ini Direktur Utama Inhutani V ini izin karena yang bersangkutan sedang tidak sehat.

Mengawali rapat hari ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kita dapat mengadakan rapat kerja dalam keadaan sehat walafiat.

Sesuai dengan jadwal acara rapat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023 yang telah diputuskan dapat Rapat Konsultasi Pengganti Bamus antara Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi-Fraksi tanggal 18 Januari 2023, hari ini Selasa 28 Maret 2023, Komisi IV menyelenggarakan Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta menghadirkan Kepala Badan Restorasi Gambut, Mangrove, serta Direktur Utama Inhutani I dan V dalam rangka membahas:

1. *Automatic adjustment* anggaran tahun 2023;
2. Tindak lanjut kunjungan kerja;
3. Isu-isu aktual lainnya.

Bapak dan Ibu yang terhormat,

Sesuai dengan ketentuan Pasal 276 ayat (1) tentang Tata Tertib, rapat kerja ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**(KETUK PALU 1 KALI)
(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.40 WIB)**

Rapat kerja ini kita mulai pada pukul 10.40 menit dan akan diakhiri pada pukul 14.40 menit. Apabila belum selesai, dapat dilanjutkan sesuai dengan Pasal 254 ayat (2) Peraturan tentang Tata Tertib atau atas kesepakatan bersama, dengan susunan acara sebagai berikut:

1. Pengantar Ketua Rapat;
2. Penjelasan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Tanggapan Anggota Komisi IV;
4. Jawaban Menteri;

5. Kesimpulan rapat;
6. Penutup.

Apakah acara dapat disetujui?

**(KETUK PALU 1 KALI)
(RAPAT:SETUJU)**

Rapat kerja ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja Komisi IV dengan Menteri Lingkungan dan Kehutanan yang dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2023, di mana salah satu kesimpulan yang telah diambil adalah bahwa Komisi IV meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tetap menjaga konsistensi komitmen agar *automatic adjustment* pagu anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak mengurangi alokasi dalam melaksanakan program-program berbasis masyarakat serta kegiatan bimbingan teknis dan sosialisasi dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat atas pentingnya menjaga kualitas hutan serta kualitas lingkungan hidup.

Selanjutnya, dalam rangka menindaklanjuti kesimpulan rapat kerja yang dimaksud tanggal 6 Februari 2023, Komisi IV telah melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan para pejabat Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kepala Badan Restorasi Gambut terkait perubahan pagu alokasi anggaran yang merupakan *automatic adjustment* pagu alokasi anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2023.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam kesempatan rapat kerja hari ini Komisi IV ingin mendengarkan penjelasan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai implikasi perubahan anggaran per masing-masing unit Eselon I. Termasuk realisasi anggaran pelaksanaan program sampai dengan Triwulan I tahun 2023, terutama program yang berbasis pada masyarakat serta pelaksanaan kegiatan Bimtek sosialisasi bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2023.

Selanjutnya, dalam kesempatan kerja hari ini, Komisi IV juga ingin mendapatkan penjelasan secara detail mengenai tindak lanjut beberapa kunjungan kerja yang dilaksanakan bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, mengingat beberapa butir rekomendasi kesimpulan hasil kunjungan kerja Komisi IV perlu mendapatkan tindak lanjut dan penjelasan lebih detail. Komisi IV secara khusus meminta penjelasan dari kunjungan kerja reses di lokasi perhutanan sosial di Kabupaten Grobogan yang mana sebagian IPHPS ditanami oleh jagung dan tanaman-tanaman hutan berupa kayu putih sebagian besar mati dan ketidakseimbangan pola tanam di lokasi Perhutanan Sosial akan menimbulkan bencana ekologi berupa banjir di daerah yang lebih rendah. Saya juga bingung, kenapa saya katakan bingung? seharusnya Dirjen Tanaman Pangan ini ke Grobogan, bukan jalan-jalan ikut menterinya. Kenapa saya katakan demikian? Grobogan ini kan salah satu penghasil kedelai terbaik di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Kenapa jagungnya tidak digantikan dengan kedelai kalau memang harus ditanami tanaman pangan, ini loh yang

saya sangat sesalkan. Juga, terjadi besar-besaran penebangan pohon kayu putih yang ada di sana hampir semua ditebang.

Bapak dan Ibu yang kami hormati,

Demikian pengantar ini kami sampaikan.

Selanjutnya, kami persilakan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan penjelasan terkait hal-hal terkait di atas. Sebelumnya, saya menerima sepucuk surat Kesekjenan permohonan izin Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari mendampingi Wamen ke London. Ini suratnya ditandatangani.

Silakan, Bu Menteri.

MENTERI LHK (Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc):

Terima kasih.

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Shalom,
Om Swastiastu,

Terima kasih.

Yang terhormat Pak Ketua,
Yang kami hormati Pimpinan Komisi IV DPR RI,
Yang terhormat Ibu dan Bapak Anggota Komisi IV DPR RI,
Kawan-kawan dari jajaran eksekutif.

Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa syukur bahwa hari ini melaksanakan rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI dan berdasarkan surat yang kami terima berkenaan dengan *automatic adjustment* anggaran tahun 2023, serta tindak lanjut kunjungan kerja dan isu aktual.

Yang terhormat Pimpinan dan Ibu dan Bapak Anggota yang kami hormati,

Izinkan saya melaporkan berkaitan dengan *automatic adjustment*. *Automatic adjustment* berlaku sebagaimana surat dari Menteri Keuangan pada tanggal 9 Desember 2022 dengan porsi Rp458.603.392.000,00 atau kira-kira 6,63% dari pagu alokasi KLHK. Dalam prosesnya *automatic adjustment* ini sudah berproses beberapa kali di rapat kerja maupun di RDP dan dalam bimbingan Komisi IV DPR RI. Dan komposisinya itu kita ambil dari belanja pegawai, belanja barang, dan juga dari belanja modal. Dari gambaran ini, komitmen tetap dipegang bahwa *automatic adjustment* yang di susun ini tidak mengganggu program-program kerja berbasis masyarakat.

Selanjutnya, mohon izin kami melaporkan konfigurasi *automatic adjustment* per unit kerja Eselon I sebagaimana, mohon periksa pada halaman

8 mulai dari Sekretariat Jenderal, Itjen, Direktorat Jenderal PHL, DAS, KSDAE, PKPL, PSI maupun Penyuluhan dan PSKL serta ada KUM dan Pengendalian Perubahan Iklim serta Pengolahan Sampah Limbah B3, dan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, serta BRGM. Ini jumlahnya Rp458.603.392.000,00.

Seperti laporan kami bahwa *automatic adjustment* ini tetap dalam posisi KLHK berkomitmen untuk tetap menjaga dari kegiatan berbasis masyarakat sebesar Rp1.674.460.589.000,00 serta pelaksanaan Bimtek sosialisasi pada tahun 2023 sebanyak 700 kali yang mulai efektif dilaksanakan pada bulan Maret 2023 pada 327 kabupaten kota yang dipilih.

Pimpinan dan Ibu dan Bapak Anggota yang kami hormati,

Selanjutnya, saya mohon izin melaporkan tentang tindak lanjut kunjungan kerja, kami memang menyiapkan dokumen secara keseluruhan 62 halaman. Izinkan saya melaporkan secara ringkas tentang tidak lanjut kunjungan kerja spesifik di Kalimantan Timur pada tanggal 25-27 Januari. Mohon periksa pada halaman 12 hingga halaman 16 yaitu berkenaan dengan PP 24 untuk Pasal 110A dan 110B. Jadi di situ sudah ada langkah-langkah yang diambil oleh Kementerian LHK dan juga tentang perizinan lingkungannya, dan juga bagaimana posisi antara RPL dan kawasan hutan serta bagaimana perizinannya dan secara keseluruhan tentang telaahan perizinan. Di sini juga KLHK telah melakukan pemasangan papan peringatan dan sebagainya.

Dan selanjutnya, Direktorat Jenderal Planologi juga mengambil langkah-langkah untuk pencermatan dan bagi keperluan sanksi administratif dan sebagainya. Di dalam datanya terlihat pada halaman 15 dan 16, sampai dengan halaman 15 dan 16.

Selanjutnya, Kunker Kota Batam. Mohon izin Pimpinan dan Ibu dan Bapak Anggota yang terhormat, mohon periksa secara rinci pada halaman 17 hingga halaman 20 yang isinya berkaitan dengan tindak lanjut penegakan hukum mangrove dan analisis serta langkah-langkah terhadap penguasaan ilegal. Jadi pengumpulan bahan keterangan jadi *full bucket* sudah dilakukan, pembentukan Satgas, kemudian turun ke lapangan, pengumpulan alat bukti dan sebagainya.

Kemudian, memang saya mohon izin melaporkan bahwa mangrove ini menjadi perhatian yang khusus, kita sedang menyusun tata kelola kebijakan di samping BRGM melakukan rehabilitasi, restorasi, dan konservasi, tetapi yang paling penting adalah bagaimana menjaga yang sekarang. Kami mengikuti langkah-langkah yang dilakukan oleh tim teknis para pejabat Eselon I Kementerian, dan saya juga sudah dilaporkan 11 atau 13 unit perusahaan dan sebagainya. Dan kami juga telah meminta kepada Dirjen PHL untuk mengatasi dengan cara mengontrol SIPUHH, SIPUHH *online*, jadi izin kalau, kalau kayu mau dilepas kan ada izin *online*-nya jadi dengan demikian sebetulnya ekspor mangrove-nya harusnya sudah *nggak* bisa lagi. Kami akan terus ikuti perkembangan ini dan terima kasih atas arahan dan kerja-kerja di lapangan.

Selanjutnya, di Bengkulu, mohon periksa pada halaman 21. Ini terkait dengan penguasaan tanah dalam kawasan hutan dan arahan untuk penataan kawasan pemukiman dalam... dalam, pemukiman masyarakat di dalam kawasan hutan jadi ini memang sudah ada arahan dan kebijakan yang *firm* dari pemerintah bahwa terhadap area pemukiman padat penduduk atau terindikasi pemukiman padat memang harus dilakukan penataan dan pengaturan kembali terhadap kawasan tersebut, jadi ini semua sedang dikerjakan. Bengkulu ini salah satu contoh aja, contoh-contoh yang lain juga banyak, lebih-lebih di daerah yang padat penduduk terutama di pulau Jawa.

Pimpinan dan Ibu dan Bapak Anggota yang kami hormati,

Selanjutnya, untuk kunjungan kerja reses di Lombok, Provinsi NTB. Saya mohon izin dan kiranya mohon periksa pada halaman 23 sampai dengan Amman Mineral ini sampai dengan 33 yaitu berkenaan dengan pengawasan dan pembinaan kinerja perusahaan dan cukup rinci, sudah ada langkah-langkah penegasan kewajiban bagi pelaku usaha baik Amman Mineral Nusa Tenggara maupun Sumbawa Timur *mining* di sini sudah ada langkah-langkah selanjutnya penegasan, kewajiban, dan perintah untuk rehadbas, untuk mengingatkan untuk reklamasi. Demikian juga untuk Sumbawa Timur *mining* pada halaman 26 dan juga penegasan kewajiban untuk PKBL (Pembinaan Kemasyarakatan dan Bina Lingkungan) jadi ini langkah-langkah ini sudah, sudah ada tindak lanjutnya dan kami akan ikuti terus perkembangan.

Demikian pula dengan proses-proses yang berkaitan dengan UKL-UPL ataupun AMDAL dan mohon periksa pada halaman 29-30 dan sebagaimana arahan pada saat Kunker untuk melihat dan mengapa begitu lama soal *tailing line* dan di sini dilaporkan bahwa secara teknis dari tahun 2021 kalau *nggak* salah ada... ada hambatan-hambatan teknis di lapangan baik ke apa namanya ketajaman ketika berada di laut dan sebagainya sehingga belum dapat diperoleh gambaran yang sangat *clear* tentang sebaran *tailing* yang terindikasi keluar dari batas izin, tapi memang indikasinya ada. Jadi oleh karena itu, kami akan terus mengikuti perkembangan ini meskipun dalam catatan pada tanggal 16 Februari itu auditor belum berhasil melakukan verifikasi yang, yang tajam untuk karena kesulitan pengambilan *sampling* di kedalaman laut di atas 1000 meter, mohon periksa pada halaman 33. Tetapi jelas diketahui bahwa dari *sampling* kualitas sedimen, itu ada, ada indikasi unsur Hg atau Merkuri yang melebihi baku mutu pada halaman 33.

Selanjutnya, dalam kunjungan kerja reses Sulawesi Tenggara pada tanggal 17-21 Februari yaitu mohon periksa pada halaman 34 dan 44 berkenaan dengan tambang, wilayah izin usaha pertambangan, dan persetujuan penggunaan kawasan hutan, sudah ada tindak lanjutnya, sudah juga mohon periksa data lapangannya petanya pada halaman 35 sampai dengan halaman 39 halaman 40. Dan juga sudah ada tindak lanjut dari Direktorat Jenderal Gakkum untuk pemanggilan 24 perusahaan, jadi sudah, sudah persiapan pemanggilan perusahaan dan kami akan ikuti terus perkembangan ini dan akan dilakukan verifikasi lapangan untuk menjadi dasar penegakan langkah-langkah hukum atas pencemaran ataupun kerusakan

lingkungan ataupun penggunaan kawasan di luar yang *legal* atau sebagai perizinannya.

Kemudian, berkenaan dengan PT di sini juga ada terkait dengan pinjam pakai PT Vale. Mohon periksa sebagai tindak lanjut pada halaman 43 bahwa ada kuota diterapkan dalam rangka pengendalian penggunaan kawasan, ini juga sudah diatur di dalam Undang-Undang 41, kemudian untuk ini akan kami terus ikuti. Jadi, di situ disebutkan bahwa kuota itu hanya 10% dari luas kawasan hutan. Selanjutnya, terkait dengan pencemaran PPK, PPKL dan pemulihan. Akan dilakukan kajian atas kualitas air permukaan akibat kegiatan tambang di lokasi tersebut dan akan dilakukan bimbingan teknik terhadap pelaku usaha.

Selanjutnya, kunjungan kerja di Jawa Tengah.

Yang terhormat Pimpinan,

Saya mencatat tadi arahan Pimpinan terkait dengan IPHPS di Grobogan, di dalam laporan tindak lanjut oleh Dirjen ini pada halaman 45-47. Saya mohon izin Pimpinan dan Ibu dan Bapak Anggota yang terhormat, Dirjen PSKL, Pak Bambang Supriyanto juga sedang ada di luar negeri hari ini, tadi Pak Sekjen belum siapkan suratnya, saya secara resmi memohonkan izin. Grobogan, Pati, Blora, Rembang, Kendal itu memang sedang dalam proses penyusunan untuk ke Perhutanan Sosial setelah persoalan KHDPK ini sudah lebih terang begitu.

Pada saat ini masih, masih terjadi sengketa di PTUN tentang ini dan sambil berjalan kita terus mengikuti perkembangannya. Di dalam tadi terhadap hal yang terjadi, saya kira itu ada aspek pendampingan Pimpinan dan Ibu dan Bapak Anggota yang terhormat. Memang kami perlu cek kembali sebab pendampingan itu seharusnya menyangkut bukan hanya kawasan, tetapi juga bagaimana tata kelola usaha dan tata kelola kelembagaannya. Kemudian terhadap bimbingan pembibitan, pembinaan, dan lain-lain kami akan tindaklanjuti.

Kemudian, terakhir saya mohon izin untuk melaporkan tentang isu aktual, dalam kali ini kami melaporkan tentang kawasan Kota Batam terkait dengan arang ilegal. Jadi, ini memang bukan hal yang mudah, karena tata kelola mangrove ini harus kita, harus kita rancang secara tepat karena wilayah mangrove-nya ada yang bukan kawasan hutan tetapi pada konteks lingkungan dia juga menjadi sangat penting sebagai ekosistem esensial yang spesifik mangrove. Kami berterima kasih mendapatkan arahan-arahan di lapangan, karena kita memang sedang mempertajam persoalan-persoalan mangrove ini untuk lebih *sharp* dan di lapangannya memang perlu lebih, lebih *strong* lagi begitu. Memang tidak mudah, karena itu wilayahnya tambak dan sebagainya.

Kemudian tentang Freeport juga terima kasih sudah ada catatan-catatan ke lapangan terkait dengan *tailing*, mohon periksa pada halaman 50 sampai halaman 61. Di sini tergambar bagaimana kegiatan verifikasi dan pembagian tugas kami lakukan dilakukan oleh tim KLHK bagaimana situasi dan

kondisi estuari mangrove dan laut, mohon periksa pada halaman 51. Dan juga sudah dikembangkan tentang pemanfaatan, mohon periksa pada halaman 54-57 dan bagaimana juga gambaran terhadap masyarakat yang terdampak pada halaman 58 dan halaman 60.

Dan terakhir tentang banjir lumpur. *Nah*, pada saat ini di sudah tertangani dan oleh PT Freeport ditangani dengan oleh tim *emergency*-nya dan terus dilakukan pembersihan dan pada saat itu kegiatan penambangan dan pengolahan dihentikan sementara dan sekarang ini sudah terkontrol dan sudah berjalan kembali.

Pimpinan dan Ibu dan Bapak Anggota yang kami hormati,

Saya sekali lagi mohon dukungan dan pertimbangan kiranya *automatic adjustment* sudah bisa di dukung dan dapat disetujui oleh yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI.

Demikian hal-hal yang kami laporkan, kurang lebih mohon maaf.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Shalom,
Om Shanti Shanti Shanti Om.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Sebelum saya berikan ke Anggota. Waktu rapat kerja terakhir perihal masalah penanganan mangrove itu nanti sampai di mana progresnya. Yang kedua, masalah bangunan yang ada di Hutan *Buru*. Waktu itu kalau *nggak* salah yang mangrove itu, 17 Maret kalau *nggak* salah, kemudian yang Hutan *Buru* itu akan diselesaikan paling lama 40 hari atau berapa puluh hari, nanti tolong dijelaskan.

Kemudian juga kami anggap, kami pernah memanggil Direktur Utama Freeport yang mengatakan bahwa dia seolah-olah Freeport tuh sudah paling hebat lah menjaga lingkungan, apa, dan lain-lain. Coba tampilkan yang kerusakannya, dari yang disebabkan oleh Freeport. *Nah*, ini, ini yang dianggap oleh Dirut Freeport itu mengatakan bahwa mereka punya menjaga lingkungan, apa, segala macam, ini yang terjadi. Tidak mungkinlah mereka ngomong janji setinggi langit seolah-olah penghijauannya paling hebat, tidak merusak alam, ini bahkan ada tuntutan ke Presiden ini. Tuntutan masyarakat distrik Agimuga dan Jita kepada Presiden Republik Indonesia beserta DPR RI, yang bunyinya kami masyarakat adat 23 kampung di tiga distrik, Agimuga, Jita, dan Manasari mendesak agar segera di audit menyeluruh atas operasi PT Freeport Indonesia, lakukan penegakan hukum yang tegas serta pemulihan atas seluruh kerusakan lingkungan hidup ya baik bagi warga sekitar lingkaran tambang dan wilayah pesisir Timika yang ada di tiga distrik. Coba, lanjutkan lagi kerusakan alamnya. *Nah* ini, terjadi pendangkalan yang luar biasa. Jadi dia kan hanya bicara bahwa hanya lingkungan yang terdampak *tok*, tetapi ujungnya hilirnya

ini yang begini terjadi. Lanjutin, coba gambarnya. *Nah* ini, terjadi pendangkalan. Waktu itu masyarakat Papua datang ke sini mengadu kepada kami, kebetulan yang menerima waktu itu Pak Dedi Mulyadi dan Pak Dedi akan berjanji untuk kunjungan kerja yang akan datang ke Freeport. Ini loh, lanjut, coba lihat lagi. *Nah*, ini akibatnya, jadi jangan pula orang Papua saudara kita di Papua ini dikasih hanya gula-gula saja, seolah-olah ini bagus, itu bagus CSR-nya sekian, tetapi kerusakan lingkungan hidupnya kan tidak diperhatikan ini. Yang saya tahu waktu itu kalau *nggak* salah Direktur Utamanya yang di datang ke sini Tony Wenas kalau *nggak* salah, itu kan waktu dia memegang yang di Sulawesi juga masalah, yang ditampilkan yang bagus-bagus, yang begini-begini tidak ditampilkan.

Terima kasih atas penjelasannya, nanti tolong dijawab.

Silakan para Anggota. Bu Ketua, silakan.

WAKIL KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M. /WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Baik.

Terima kasih.

Bu Menteri, Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati,

Sebelum ke para Anggota saya mengingatkan ketika di NTB kebetulan saya ya sama beberapa teman-teman Pak Johan, siapa lagi ya? banyak lah, banyak. *Nah*, ini memang dalam laporan ini belum ada hasil audit ya Bu ya? belum ada konfirmasi, belum ada konfirmasi tentang hasil audit itu kita tunggu karena sebenarnya dalam model yang sudah disampaikan, itu sudah kelihatan itu di luar batas zona yang sudah ditetapkan. *Nah*, apa butuh waktu lama untuk itu, karena kalau itu kan di laut ya Bu, Bu Menteri ya, kalau di laut kalau misalnya kita lama untuk menindak itu apakah bukankah itu akan membahayakan akan sangat cepat sekali untuk menyebar, itu pertama.

Lalu yang kedua, meskipun ini mungkin tidak terlalu berkaitan dengan lingkungan, tetapi PT Amman itu punya karyawan 10.000 kalau tidak salah ya Bang Johan ya Bu Dirjen 10.000 staf. Oh iya, di situ ada Bang Rudi, saya *nggak* lihat, iya mohon maaf Bang Rudi. Ada 10000 apa karyawan, staf yang agak ironis karena NTB ini kasus gizinya masih tinggi, lalu kemiskinannya juga masih tinggi, kenapa tidak kemudian ada, ada kebijakan jadi *off taker* PT Amman ini. Kemarin waktu di sana kita sempat angkat itu, hasil yang di, hasil bumi, hasil ternak, hasil perikanan yang ada di apa yang ada di NTB itu langsung di *off take* aja dan pasti tentu dengan pendampingan ini saya minta untuk juga didampingi Bu Menteri supaya pemberdayaan yang itu juga dilakukan untuk masyarakat sekitar sana. Artinya, tidak hanya bicara saya bagus sudah ada CSR, tetapi *nggak* ada, *nggak* ada, *nggak* kelihatan apa yang sudah dilakukan untuk masyarakat. Kalau misalnya mereka jadi *off take* itu udah, udah selesai itu sebenarnya kan ada 10.000 belum yang lain-lain, 10.000 karyawan, belum keluarganya. Ya kalau kita dihitung kan kalau misalnya dia belanja gitu dalam

satu keluarga dia punya anak dua, sudah empat, bisa aja dikali 3, kalau anaknya ini. Kalau saya anaknya 4, kali berapa coba? belum tentu di sana juga anaknya sedikit gitu ya. Artinya, ada jalan keluar, ada jalan keluar di depan mata untuk, untuk bisa memberdayakan masyarakat dengan adanya PT Amman tersebut.

Saya pikir itu catatan, nanti mohon untuk direspon juga.

Selanjutnya Ibu Endang silakan untuk memberikan tanggapan.

F-P.GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI DESS, M.Sc):

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Salam sejahtera untuk kita semua,
Shalom,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan, dan terakhir
Salam Indonesia Raya.

Yang terhormat Pimpinan dan Wakil Pimpinan serta Anggota Komisi IV DPR RI,
Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI yang saya banggakan beserta jajarannya,
Pak Sekjen dan seluruh pejabat Eselon I, kemudian
Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove beserta jajarannya,
Dirut Inhutani I dan V.

Pertama kali, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan dan mohon maaf lahir batin bila ada kesalahan. Semoga di bulan puasa ini kita makin giat bekerja.

Ada beberapa usulan dari kami dan tanggapan dari Fraksi Gerindra yaitu yang pertama *appreciate* tentunya bahwa KLHK yang melakukan sebagian besar blokir *automatic adjustment* TA 2023 bersumber dari kegiatan perjalanan dinas. *Nah*, ini juga kami *appreciate*, karena menurut kami perjalanan dinas yang tidak penting itu juga harus dikuasai dan harus dikurangi. Namun demikian, Fraksi Partai Gerindra meminta agar enam Eselon I yang realisasi anggaran tahun 2022-nya di bawah rata-rata realisasi anggaran KLHK tahun anggaran 2022 yaitu sebesar 98,04%. *Output* dari anggaran yang telah teralokasi sebetulnya dapat diserap secara optimal, tapi ternyata dari ke-6 Eselon I tersebut antara lain BRGM hanya menyerap 97,43%, BSI di sini 97,49%, kemudian PPI 95,94%, PDASRH 96,15%, PPKL 97,43%, dan KSDAE sendiri 97,43%. *Nah*, untuk itu Bu Menteri, saya harapkan bisa menindaklanjuti dengan baik.

Kemudian yang kedua, sehubungan dengan hasil Kunker yang tadi dikemukakan Pak Ketua. Fraksi Partai Gerindra meminta agar KLHK tetap

melaksanakan rencana dan tingkat lanjut yang telah dilakukan, serta ikut memonitoring terhadap pelaksanaannya, dan melaporkan kepada Komisi IV. *Nah*, tadi sudah diungkap juga oleh Ibu Anggia, Ibu Doktor Anggia.

Yang ketiga, tentu saja tadi kami ingin dari Eselon I sampai Eselon VI, eh 6 Eselon I ini bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah, Bu Menteri, karena dalam pelaksanaannya program pembangunan kehutanan itu kalau tidak melibatkan daerah akan sia-sia saja. *Nah*, saya akan *appreciate* ini kepada Ibu Vivien, dengan kerjasama daerah contohnya di Bogor dapat penghargaan Adipura karena salah satunya adalah pengelolaan sampah yang sudah bisa dikelola dengan baik dan dikelola oleh para pensiunan ini sehingga merupakan contoh yang baik untuk dilakukan di tempat-tempat lain. Kemudian juga NGO harus dilibatkan, *nah* tapi tadi kita harus ada kisi-kisi yang menjembatani bahwa semuanya untuk kemasyarakatan umat kita.

Kemudian pada isu-isu aktual lainnya ditindaklanjuti bahwa KLHK belum melaporkan bagaimana penanganan dugaan terjadinya *illegal logging*. *Nah*, jadi kami minta dari Partai Gerindra supaya melaporkan dengan baik.

Kemudian yang kelima, melalui Kepmen LHK nomor SK 01 Men-LHK Setjenkum tanggal 1 bulan 1 2022, tentang Pencabutan Izin Konsensi Kawasan Hutan. *Nah*, mohon ini karena semua kawasan yang dicabut ini seluas *tiga juta seratus dua puluh enam empat ratus tiga puluh sembilan koma tiga puluh enam hektar*, namun pada periode September 2015 sampai Juni 2021 KLHK juga telah mencabut izin 42 unit konsensi pemanfaatan hutan sebanyak seluas *delapan ratus dua belas tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh enam koma sembilan tiga hektar*. *Nah*, terkait hal ini Fraksi Partai Gerindra meminta penjelasan, Ibu, bagaimana tindak lanjut dari keputusan ini mengingat pencabutan izin dapat menyebabkan *open access* yang dapat berdampak negatif terhadap kawasan tersebut. Selain itu, kami juga ingin meminta penjelasan terkait perkembangan terbaru atas kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemegang izin seperti pelunasan PNBP-nya, *nah* juga tentang reklamasi dan penanaman rehab DAS mengingat pencabutan izin ini tidak membebaskan pemegang izinnya.

Nah, yang keenam, berdasarkan hasil rapat tanggal 18 januari 2023 Komisi IV DPR RI meminta Kementerian LHK untuk menyampaikan *update* data-data. *Nah*, tadi sudah dikemukakan Pak Ketua dan Ibu Doktor Anggia, Wakil Ketua supaya hal ini selamat-lambatnya satu bulan sejak dilaksanakan rapat kerja dapat disampaikan.

Nah, yang ketujuh, tentang permasalahan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kami dari Fraksi Gerindra meminta agar Kementerian LHK lebih responsif terhadap keluhan-keluhan dari masyarakat, terutama tentang *illegal logging* yang di kawasan register 17 dan 35 di kecamatan Katibung, Lampung Selatan dan dugaan terjadinya *illegal logging* di kawasan hutan tersebut tentu saja meminta kepada KLH untuk meningkatkan anggarannya sebagai penguatan dari sistem pengaduan dan pengamatan hutan, serta perhatian.

KETUA RAPAT:

Masih lama, Bu Endang?

F-P.GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI DESS, M.Sc):

Satu lagi, Pak. Baik.

Semuanya sudah saya tulis dengan baik dan saya kira yang terakhir ini penting juga Pak karena ada SK Dirjen Nomor SK-8 PLHK Sekretariat Nomor 102/2023 tentang Pembentukan Satuan Tugas Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Ekosistem Mangrove yang tadi dikemukakan, Pak Ketua. *Nah*, ternyata sampai dengan tanggal 14 Februari 2023, Fraksi Gerindra meminta agar pembentukan Satgas tersebut perlu lebih dipertegas lagi dalam pengumpulan alat buktinya.

Demikian yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV, Ibu Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan dan Bapak Sekjen dan seluruh pejabatnya. Kita akhiri dan tidak lupa mohon tanggapan, catatan, masukan.

Demikian.

*Billahi taufik wal hidayah,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Salam Indonesia Raya.

WAKIL KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M. /WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Terima kasih Bu Endang.

Pak Edward Tannur.

F-PKB (EDWARD TANNUR, S.H.):

Baik, Pak Ketua.

Selamat pagi untuk kita semua,

Yang saya hormati Pak Ketua dan singkatnya Pimpinan Komisi IV beserta Anggota Komisi IV,
Ibu Menteri beserta jajarannya,
Pak Sekjen dan jajarannya,

Jadi yang kita persoalkan mengenai lingkungan hidup ini adalah terjadi kerusakan kawasan hutan dan konservasi alam ini, ini perlu mendapat perhatian khusus selain kita bahas juga *automatic adjustment*. Kalau secara garis besar memang kita melihat bahwa program-program yang menyentuh hajat hidup orang banyak, Ibu Menteri, agak mengurangi biaya yang banyak itu

jalan-jalan dikasih kurang, rapat-rapat yang *nggak* penting kasih kurang, kita urus rakyat dulu sekarang, karena keadaan sekarang memang sangat mendesak, kepentingan rakyat harus kita dahulukan.

Kami juga mengapresiasi Kementerian Lingkungan Hidup tetap mempertahankan eksistensi hutan-hutan yang ada sekarang memang kita berjuang, tapi pasti ada kurangnya karena ulah manusia ini kan kalau dia terdesak dia akan masuk. Jangan manusia, gajah saja kalau terdesak dia akan keluar ke pemukiman. Jadi, sangat baik apa yang sudah Ibu lakukan ya sebatas kewajaran yang ada, memang ada kurang, dari tadi saya omong memang ada kurang, tapi sudah melakukan beserta jajarannya.

Dan juga mengenai apa kebakaran hutan, karena kita tahu sesuai BMKG memprediksi bahwa tahun ini panas El Nino-nya akan lebih panjang. Ini memberikan sinyal kepada kita bahwa akan terjadi kebakaran hutan yang lebih panjang dan mungkin lebih ganas lagi. Jadi, ya seperti Pak Ketua bilang, ini *kayak lah kadang hutan aja* sudah ada kah mobil pemadam atau belum ini di hutan-hutan ini, kalau belum ada, tolong pengadaan lah supaya mengantisipasi kebakaran hutan, karena kalau tanaman hutan sudah terbakar kita tanam kembali itu butuh waktu cukup lama, biaya juga cukup lama, tapi semuanya kembali lagi pada ketersediaan anggaran. Kita tidak bisa serta merta untuk pengadaan alat-alat pemadam itu, kalau dari Kementerian Keuangan dana yang dikasih saja masih dipotong lagi. Nah ini sebenarnya Komisi IV tidak setuju, karena Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini sumber daripada kehidupan. Kalau hutan tidak ada, air tidak ada, kamu tanam itu, tanam padi di situ, tanam biar kering di situ. Jadi, peran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini sangat sentral untuk peradaban kehidupan makhluk hidup, bukan manusia saja, makhluk hidup. Jadi kami sangat memberikan apresiasi, apapun yang Ibu lakukan, Komisi IV saya secara pribadi atau Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa selalu memberikan atensi dan dukungan yang positif. Tapi, Ibu, jangan lupa kita punya Polisi Hutan ini kalau ada dana tambah dulu, karena yang merusak lebih banyak daripada yang memperbaiki atau yang menjaga. Ini memang poin-poinnya saya ambil secara global saja, jadi nanti baru kita *breakdown* secara satu persatu. Jadi seperti perusakan hutan atau perambahan hutan ini dilakukan bukan hanya manusia saja, gajah, harimau juga bikin rusak ini hutan juga, ya mungkin karena habitatnya terganggu akibat dari ulah manusia.

Jadi saya melihat bahwa penindakan tegas juga kepada itu yang bikin arang kayu di Batam itu, itu harus tindak tegas. Kita mengeluarkan anggaran untuk pemeliharaan mangrove, penanaman mangrove ini keluarnya bertriliun, artinya pingin buat arang kayu lagi ini, gila ini, ini sangat, sangat melanggar etika maupun peradaban manusia ini. Jadi, Pak Ketua marah-marah itu memang betul, maka itu dilakukan sidak dipasang *police line*.

Jadi, ini perlu kita semua sama-sama menyadari. Kami sebagai mitra dari Kementerian KLHK kami juga prihatin, karena deforestasi terjadi di mana-mana, perubahan iklim yang ekstrem membuat kita di sektor pertanian juga terpengaruh dahsyat di sana, dan kita sekarang lagi impor beras juga, nanti sebentar impor apalagi kita belum tahu ini. Jadi konektivitas antara

Kementerian Pertanian, Lingkungan Hidup, dan mungkin juga dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, karena kita tahu di pesisir itu mangrove merupakan habitat daripada ikan-ikan, kepiting, dan lain-lain. Kalau mereka habitat tempat untuk bertelur atau mencari makan atau berlindung rusak, ya tinggal giliran kita manusia saja kapan mau rusak.

Jadi saya memberikan apresiasi lagi bahwa apa yang tadi sudah Ibu sampaikan saya sangat memahami dan mudah-mudahan untuk tahun 2019 ini, Ibu tetap berkomitmen untuk menjaga lingkungan eh 2024, 23-24 ini tetap berkomitmen menjaga lingkungan dan hutan kita agar tetap lestari. Cuma saya mau tanya lagi satu, Ibu, itu Pulau Komodo sudah sampai di mana itu izinnya? Pulau Komodo izin ini apa wisatanya itu masih apa kan, apa SK Gubernur tentang tarif masuk itu masih tetap atau sudah ada penyesuaian? Oh, cabut saja itu, kalau bisa bakar saja, repot sekali, orang lagi susah dia buat SK yang aneh-aneh. Gubernurnya Ibu walaupun dari NasDem tapi dia *nggak* calon gubernur lagi, tanggal 21 pendaftaran DPR ini dia sudah ke DPR RI, jadi jangan dia tinggalkan borok untuk masyarakat di NTT ini. Ini yang kita, kami sebagai wakil rakyat juga prihatin, ini kita terima masyarakat dari Pulau Komodo Manggarai Barat, kita prihatin. Tapi saya bilang ini semua harus mekanisme, jadi tidak bisa kita memberikan apa keputusan yang tergesa-gesa.

Jadi, Pak Ketua, saya tambah lagi sedikit lagi, sedikit, sedikit saja, Pak. Ini karena lingkungan hidup ini kita kalau *ngomong* kurang pas juga salah ini. Jadi, baik mengenai tindak lanjut tadi mengenai pencemaran, perusakan hutan dan lingkungan ya tindakannya harus tegas karena ini kejahatan yang luar biasa ini, karena berdampak pada kehidupan dan peradaban manusia. Jadi ini butuh jangan tebang, jangan pilih-pilih, rata saja, sudah terang saja. Siapa yang melakukan pelanggaran ya diberi sanksi yang setimpal, Ibu Menteri harus bisa memberikan apa semacam *stressing* sehingga orang itu bertobat sudah. Ini dia hanya memikirkan kepentingan pribadi, tapi korbannya banyak orang.

Mungkin saya hanya mengulas tentang ini, jadi laju deforestasi itu harus dikurangi. Memang beberapa tahun terakhir ini kebakaran hutan kecenderungannya menurun, berarti ada positif yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi, saya terima kasih banyak, saya kira hanya ini saja yang secara garis besar saya melihat yang perlu disampaikan.

Terima kasih banyak Pak Ketua, Ibu Menteri, dan rekan-rekan yang hadir pada saat ini.

Shalom.

WAKIL KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M. /WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Shalom,

Terima kasih Pak Edward.

Yang perlu digarisbawahi yang saya ingin menekankan itu tentang tahun ini panjang musim keringnya ya, jadi kemungkinan. Iya, kemaraunya kemungkinan maju dan agak lebih panjang, diprediksi seperti itu. Jadi kemungkinan untuk apaantisipasi untuk kebakaran hutan memang harus disiapkan.

Pak Sutrisno.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si):

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Selamat pagi, dan
Salam sejahtera buat kita sekalian,

Pimpinan beserta para Anggota Komisi IV,
Pak Menteri beserta jajaran Eselon I,
Para Dirut dari Perhutani.

Kami langsung pada *automatic adjustment*, Bu Menteri. Dengan adanya *automatic adjustment* konsekuensinya memang pagu anggaran yang pada tahun 2023 ini sesungguhnya adalah pagu anggaran terendah yang dimiliki oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dengan adanya *automatic adjustment* ini semakin kecil lah anggarannya. Di sisi lain, kerusakan hutan, kerusakan lingkungan, sampah ya terserak di mana-mana konsekuensinya adalah banjir di mana-mana, dampaknya terganggunya produksi pangan kita.

Kemudian, dari pembahasan awal anggaran 2023 baru diketahui, Bu Menteri, ternyata sumber dana anggaran KLHK itu sebagian besar adalah dari pendapatan sendiri dari PNBPN. Oleh karena itu, kalau dicermati di apa namanya Ditjen Pengelolaan Sampah ini yang terendah hanya Rp186 miliar, kemudian Penegakan Hukum juga turun semuanya, sedangkan persoalan-persoalan dari hasil Kunker, reses pun juga banyak persoalan yang harus ditangani oleh ada Direktorat Jenderal ini. Oleh karena itu dengan pertimbangan-pertimbangan yang tadi disampaikan ya, dengan mohon maaf dengan tidak mengurangi apa yang telah dibahas sebelumnya karena baru tahu apa namanya *listing* dari pada posisi anggaran kita, saya sudah minta izin kepada Kapoksi saya itu untuk Poksi PDI Perjuangan mengusulkan agar LHK ini tidak dikenakan *automatic adjustment* gitu supaya tetap anggaran yang kecil ini jangan dikurangi lagi, malah seharusnya ditambah.

Kemudian yang kedua, pada halaman 9. Tadi Bu Menteri juga menyampaikan sekalipun ada pengurangan anggaran lewat *automatic adjustment* ini tetap apa namanya kegiatan ke masyarakatan gitu tetap dijalankan sekitar 1,674 triliun, hanya saja dalam penjelasan itu hanya akan dilaksanakan pada sekitar 327 kabupaten dan kota yang terpilih ya. Kami ini kan kalau ke apa namanya reses, Kundapil, selalu menjadi persoalan dengan masyarakat ya, mudah-mudahan dari 327 ini semuanya juga Anggota Komisi IV pun juga di wilayah Anggota Komisi IV. Oleh karena itu, juga mohon untuk

apa namanya di, disampaikan kepada kami supaya pada satu sebuah kepastian.

WAKIL KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M. /WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Itu, itu.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si):

Di sisi lain, di sisi lain.

WAKIL KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M. /WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Itu. Pak Sutrisno. Itu aspirasi semua itu untuk teman-teman Komisi IV semua.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si):

Oh gitu, terima kasih kak kalau sudah demikian.

WAKIL KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M. /WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Kan tadi di *slide*-nya Bu Menteri begitu.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si):

Iya. Kemudian yang ketiga, Ibu Menteri. Di lapangan saya menangkap, begitu gencarnya sekarang LHK itu melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang penataan kawasan hutan ya itu. Konsekuensi daripada kegiatan itu sudah ada dampaknya yang merugikan masyarakat ini, Pak, ya, di daerah di dapil kami rakyat sudah dipungutin uang ya dengan dalil untuk biaya proses ini. Kami mohon penjelasan dan mengejutkan angkanya sampai 800 juta itu ya, itu per bidang bukan per, bukan per rumah tangga, per bidang calon pemilik itu, siapa gerangan? LSM dengan perangkat desanya. Jadi kami mohon dijelaskan sebenarnya prosesnya ini dengan, dengan dalil nanti dalam waktu cepat akan segera dikeluarkan sertifikatnya, nagihnya juga kan pada kami ya masyarakat itu, karena masyarakat tahu kami adalah mitranya apa nama Kementerian LHK.

Kemudian, berikutnya. Pada rapat yang lalu dalam satu keputusan rapat komisi dengan Komisi IV, Komisi IV itu kan menolak itu ya apa namanya pengelolaan perhutanan sosial pada kawasan hutan dengan pengelolaan khusus, tapi kemudian kementerian Ibu mengeluarkan Permen LHK Nomor 4 Tahun 2023. Kami ini mohon penjelasan ini, ada satu kontradiktif antara apa yang telah diputuskan oleh Komisi IV dengan apa yang diputuskan oleh Kementerian LHK.

Dan berikutnya Pak, Bu Menteri, di Dapil saya di Sumedang sudah sering kami sampaikan itu di Dapil Sumedang ini, itu ada lahan kehutanan itu sekitar 480 hektar di sekitar Cadas Pangeran, lahannya subur itu, informasinya itu adalah HGU PT Setiabudi, tapi tidak dimanfaatkan hanya dimanfaatkan taman tanam rumput, rumput untuk dijual karena pada saat di mana sapinya? mereka juga tidak menjelaskan. Kami sudah menyampaikan juga sama Kementerian Pertanian, daripada dimanfaatkan untuk itu akan lebih baik lahannya bagus, iklimnya juga indah, itu bisa menanam kacang kedelai sehingga kebutuhan pangan kita juga bisa terpenuhi.

Kami kira itu yang ingin kami sampaikan, ya mudah-mudahan dapat respon dengan baik dari Bu Menteri.

Demikian.

Warahmatullah wabarakatuh.

WAKIL KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M. /WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Wa'alaikumsalam,

Terima kasih, Pak Sutrisno.

Jadi saya ulangi tadi yang disampaikan oleh Bu Menteri itu memang khusus untuk aspirasi untuk para Anggota, jadi yang sekian berapa tadi 300 sekian kabupaten kota itu ya 400 sekian gitu.

Pak Hanan, silakan.

F-PG (Ir. H. HANAN A. ROZAK, M.S.):

Terima kasih, Pimpinan.

Anggota Komisi IV yang saya hormati,
Bu Menteri beserta jajaran Eselon I,
Dirut Perhutani yang saya hormati.

Yang pertama terkait dengan *automatic adjustment*, Bu Menteri. Tentunya angka Rp458 miliar lebih itu sudah perintah ataupun petunjuk dari Kementerian Keuangan tinggal bagaimana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membaginya ya, mendistribusikannya ke unit Eselon-Eselon I. Ini yang mau saya mohon informasi, Bu Menteri, apa namanya di kolom dua itu apa namanya pengalokasian *automatic adjustment* per Eselon I *tuh* dasarnya apa? apakah proporsi anggaran berdasarkan pagu 2023 yang sudah ada atau dasarnya apa, itu dulu yang pertama.

Kemudian yang kedua. Yang dibintanginya itu, apakah di bintanginya kegiatan secara utuh atau ada kegiatan-kegiatan yang tidak utuh. Misalnya saja ada kegiatan-kegiatan yang harus misalnya saja 12 unit menjadi 6 unit misalnya,

akibat dibintangi. Ini kami mohon informasi itu karena ini sangat erat kaitannya dengan capaian-capaian yang akan kita capai di 2024.

Bisa dipahami, Bu, ya maksud saya, Bu, Bu Menteri? Bisa Bu?

MENTERI LHK (Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc):

Saya tahu. Cuma saya tanya, kenapa *nggak* selesai-selesai karena udah RDP berkali-kali.

F-PG (Ir. H. HANAN A. ROZAK, M.S.):

Nggak, proporsinya yang saya tanyakan.

MENTERI LHK (Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc):

Itu yang saya tanya ke Pak Sekjen.

F-PG (Ir. H. HANAN A. ROZAK, M.S.):

Proporsinya itu per Eselon I atau dasarnya apa? apakah anggaran eksisting yang ada misalnya Sekjen *empat ratus lima puluh tujuh* per APBN yang ada di KLHK atau apa? apa atau berdasarkan kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak mengganggu, *nah* seperti itu ya.

Kemudian, berikutnya terkait dengan ini berkaitan dengan antisipasi yang akan kita hadapi yang sudah banyak di apa namanya disampaikan oleh beberapa ahli maupun pengamat kemungkinan-kemungkinan Bu ya di tahun 2024 ini kita akan menghadapi musim kemarau misalnya. Ini misalnya, terkait dengan antisipasi terkait dengan kebakaran hutan dan gambut. Khusus untuk gambut ini, Pak Kepala BRGM, kami mendapat informasi dari seluruh gambut yang rusak itu yang perlu direstorasi itu sudah berapa persen yang sudah direstorasi ya, kemudian antisipasi menghadapi kemarau ini seperti apa? Kemudian juga kesiapsiagaan kebakaran hutan, Bu Menteri, baik yang di kawasan-kawasan yang dikuasai oleh pusat melalui UPT-UPT pusat maupun KPH, apakah sudah dikoordinasikan menghadapi kemungkinan apa namanya bencana kebakaran di 2024. Beberapa tahun ini 2, 3 tahun ini kita aman karena kemaraunya kemarau basah, ini kemungkinan setelah kemarau basah nanti ada kemarau kering, *nah* itu yang sangat kita khawatirkan terjadinya kebakaran hutan yang akan berdampak yang luas.

Kemudian, yang berikutnya yang ketiga, terkait dengan penataan kawasan hutan, Bu. Kalau di Jawa sudah dicoba dengan KHDPK, *nah* ini apakah mungkin gitu ini bisa diterapkan di luar Jawa. Misalnya saja yang banyak bermasalah sekarang ini di Provinsi Lampung, Bu, daerah kita sendiri, diberlakukan maksud saya, KHDPK ini untuk khususnya di kawasan-kawasan hutan produksi yang tidak dapat dikelola secara maksimal oleh pemegang izin, *nah* ini kemungkinan-kemungkinan bisa di KHDPK-kan juga gitu maksud saya. Ini kalau mungkin ini sangat baik ya, sekaligus kita menata kawasan hutan yang saat ini bermasalah.

Kemudian terkait dengan DAK, tadi saya sudah SMS, Pak Sekjen ya. DAK bagaimana DAK ini bisa mendukung KPH, KPH, kita berikan tugas tapi tidak kita *support* dengan anggaran apakah dimungkinkan gitu menu-menu DAK itu bisa masuk ke KPH, *nah* sehingga KPH bisa melaksanakan tugasnya ada dukungan anggaran dari pusat. Saya kira ini, Bu.

Kemudian yang terkait dengan ini, Bu, yang hasil kunjungan ke NTB. Kan sudah ada indikasi Bu ya, ada indikasi sebaran *tailing* yang keluar dari batas izin, sudah ada indikasi, bahkan kandungan merkuri sudah melampaui baku mutu, ada indikasi itu. Ini sudah ada indikasi, namun auditnya belum selesai. *Nah*, ini apa yang perlu dilakukan langkah-langkah terkait dengan pengamanan lingkungan ini Bu? walaupun belum hasil audit belum ada, yang sudah dilakukan, yang perlu kita lakukan apa sehingga ini tidak bisa tidak akan menyebar yang lebih luas lagi.

Demikian.

WAKIL KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M. /WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Maksud Pak Hanan tidak menunggu artinya ya, apa langkah berikutnya jika misalnya memang sampai hari ini belum terkonfirmasi.

Selanjutnya, Pak Abdullah Tausikal, silakan.

F-P.NASDEM (Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.Si.):

Terima kasih, Pimpinan.

Yang saya hormati Pimpinan, Anggota Komisi IV,
Yang saya hormati Bu Menteri, Pak Sekjen, beserta jajarannya.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Hari yang sangat berbahagia, *Insyah Allah*, kita semua sehat, kita semua bahagia, dan mudah-mudahan kegiatan Raker ini tidak terlalu lama karena mengingat bulan puasa.

Saya mewakili Fraksi Partai Nasdem, ada berapa hal yang menjadi yang perlu kami sampaikan.

1. Fraksi Partai Nasdem menilai perlu adanya perhatian khusus terkait penertiban dan perpanjangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Dari laporan KLHK pada tahun 2022, maka masih banyak pemegang IPPKH yang sudah habis dan/atau masih dalam tahap perpanjangan, harus ada evaluasi yang jelas dari KLHK terkait berapa izin yang sudah kadaluarsa dan molornya perpanjangan izin tersebut. Perhatian yang sama juga ditujukan kepada penertiban izin baru PPKH seperti pada PT Sumbawa Timur Mining hingga saat ini konflik antara massa yang ada di daerah sekitar hutan masih terjadi dan harus menjadi

prioritas untuk dicarikan solusinya mengingat daerah tersebut pernah mengalami konflik yang berkepanjangan, terbakarnya Kantor Bupati pada tahun 2012 disebabkan konflik tambang;

2. Fraksi Partai Nasdem mendukung terbentuknya Satuan Tugas (Satgas) terkait dengan penegakan hukum aktivitas arang illegal di sekitar kawasan hutan mangrove. Selain merusak ekosistem hutan, mangrove aktivitas arang illegal ini menyebabkan rehabilitasi mangrove tak kunjung mencapai target. Oleh sebab itu, pemberdayaan masyarakat dalam hal meningkatkan sumber ekonomi di sekitar kawasan hutan harus diperhatikan melalui program yang melibatkan KTH bila dalam bentuk pengembangan wisata alam, pengelolaan perikanan, dan produk kerajinan.

Ibu Menteri yang saya hormati,

Di Indonesia ini, kita memiliki kawasan hutan lindung yang sangat cukup banyak, salah satunya juga di Maluku. Kawasan lindungi ini otomatis dia berbatasan dengan hutan adat maupun hutan rakyat, juga berbatasan dan di dalam juga ada desa-desa masyarakat yang sangat cukup banyak. Kegiatan seminggu yang lalu, itu ada kurang lebih 20 desa atau 20 negeri ke DPRD Kabupaten, Provinsi, bahkan ke Gubernur, soal pemantapan, pemantapan kawasan hutan yang ada di wilayah mereka. Mereka tahu bahwa batas hutan lindung itu sudah ada, namun batas-batas atau hutan adat atau hutan rakyat ini kemarin itu ada pemantapan bahkan pemasangan patok atau PAL sehingga menjadi sedikit ada kondisi beda pendapat yang ada di sana. Kami mengharapkan itu agar perlu ada sosialisasi dan saya kira kegiatan ToR, Bimtek ToR itu juga salah satu solusinya. Untuk ini banyak juga desa-desa ini juga daerah apa ya, daerah masyarakat yang ada di pegunungan, ilmu pengetahuan sangat terbatas, kalau di provokasi sedikit itu bisa menjadi hal-hal yang kurang bagus.

Yang kedua, kami harapkan juga ada kegiatan perhutani sosial. Kegiatan-kegiatan bantuan ini diprioritaskan ya bukan hanya di Maluku, tapi daerah-daerah lain yang memiliki hal yang sama.

Saya kira ini aja yang saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi perhatian.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

WAKIL KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M. /WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Wa'alaikumsalam,

Terima kasih, Pak Abdullah Tausikal.

Pak Suhardi Duka, silakan.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Yang saya hormati Pimpinan, Anggota Dewan yang terhormat,
Yang saya hormati Bu Menteri, Sekjen, dan para pejabat Eselon I, para Dirut,

Yang pertama saya ingin sampaikan dulu kondisi di daerah yaitu terhadap konflik PT Mamuang dari Astra dengan masyarakat Kabuyu di Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat. Sebenarnya masyarakat Kabuyu ini adalah masyarakat adat, dia sudah menanam sawit di situ, tapi setelah keluar apa ya kawasan hutan ini diberikan kepada PT Mamuang, mendapatkan HGU, kemudian PT Mamuang membabat sawit rakyat ini. Jadi, sebenarnya yang keliru ini siapa ini, di satu sisi rakyat kita korban akibat ya janganlah sawitnya yang rakyat di... di... dengan alasan bahwa PT Mamuang ini menganggap bahwa ini HGU saya. Saya minta tolong kepada Ibu Menteri bisa melihat ini secara lebih bijak terhadap kondisi kita di daerah.

Yang selanjutnya, *automatic adjustment* ini ya seperti halnya kita ini Menteri Keuangan saya nanya saja ini, kasih keluar surat *automatic adjustment* lagi Pak, *adjustment* lagi, seperti malaikat saja. Yang perlu di *automatic adjustment* itu adalah Rp349 triliun yang ada di Kementerian Keuangan, ke mana itu? kalau itu bisa diamankan oleh Kementerian Keuangan bisa dibagi-bagi kepada kementerian ke lembaga yang lain bukan di *automatic adjustment*, nah ini. Jadi dua masa rapat, masa sidang kita ini bahas *automatic adjustment* terus. Namun demikian, fraksi saya menyetujui Bu Menteri terhadap *automatic adjustment* yang diajukan oleh Kementerian Kehutanan dengan catatan tidak mengurangi program yang bersangkutan paut dengan masyarakat.

Yang selanjutnya, saya ingin Pak Ruandha kemarin janji saya untuk menyelesaikan SHM-SHM yang masuk kawasan hutan, saya minta Pak Ruandha supaya bisa disegerakan.

Dan yang terakhir adalah daya dukung lingkungan kita memang semakin rendah. Kita lihat masyarakat kita banjir di mana-mana, saya kira ini menjadi penyadaran kepada kita semua dan kesadaran bagi pemerintah untuk mengalokasikan anggaran yang lebih besar kepada perbaikan lingkungan. Kalau begini terus saya kira kita akan semakin tidak didukung oleh kondisi lingkungan dan dalam pembangunan ini.

Saya kira demikian, Ibu Menteri.

Terima kasih.

*Wallahul muwafiq ila aqwamith thariq,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

WAKIL KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M. /WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Wa'alaikumsalam,

Kita di DPR, di semua lembaga disibukan dengan *automatic adjustment*, makhluk yang *nggak* jelas sebenarnya buat apa. Apa namanya otomatis *stabilizer* atau *whatever* lah, yang jelas *nggak* harus sebenarnya *nggak* harus seorang Menteri Keuangan dengan pengalaman yang luar biasa untuk hanya memotong-motong anggaran saja untuk mendapatkan *saving* anggaran.

Selanjutnya Pak Syafrudin, Bang Rudi Mbojo.

F-PAN (H. MUHAMMAD SYAFRUDIN, S.T., M.M.):

Terima kasih, Ibu Ketua.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Bu Menteri, Pak Dirjen, saya tadi kaget dipanggil sama Saudara Ketua tadi. Saya coba justru sedang mengkomunikasikan hal-hal yang *update* masalah aman dan itu supaya tidak salah menyampaikan.

Bu Menteri, sama kepada teman-teman sekalian yang sudah menyampaikan masalah hasil kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Barat, saya menyampaikan apresiasi. Dan memang masalah lingkungan dan limbah ini memang kalau bisa, Bu Menteri, ya bisa disampaikan kepada publik hasil verifikasi yang disampaikan oleh kita baik secara berkala menengah atau panjang supaya publik tahu khusus masalah Amman itu, karena memang terus terang dari hasil rapat kita kemarin cukup panjang dan besar sekali pipanya tapi memang selama ini tidak mendapat apa namanya protes yang terlalu *crucial* dari publik karena memang bagus. Namun demikian, tetap harus diberikan advokasi bagi oleh kita selaku, selaku pemerintah dan mitra supaya ini tetap bisa berjalan dengan baik, karena Amman itu sebelumnya adalah Newmont sudah cukup lama sekali dan saya kira hal-hal yang terjadi di lapangan itu wajar kalau diberikan masukan oleh publik. Terutama kemana sih *tailing* yang dibuang dari pipa itu, apakah benar air yang turun dari pipa itu kedalamannya sekian kilometer itu murni tidak akan mengganggu habitat laut dan terakhir tidak akan mengganggu bagaimana nelayan itu untuk mencari makan dengan hasil tangkapannya karena di sekitar itu. Ini memang masyarakat mengharapkan verifikasi dari kita dari lingkungan hidup, sekali lagi secara berkala menengah ataupun jangka panjang itu selalu di *update* kepada publik.

Kemudian memang kemarin kami juga ke waktu, waktu kunjungan itu membahas masalah Sumbawa Timur Mining yang sekali lagi notabene Sumbawa Timur Mining ini adalah memiliki kandungan mineral yang cukup lebih banyak daripada Newmont atau Amman, namun ini kan belum berjalan. Tetapi bagi kita selaku mitra dan pemerintah, tidak ada salahnya kita menanyakan apa sih konsepnya Anda, masalah lingkungan dan yang lain-lain.

Ini penting, supaya pada saatnya ini tidak hanya berjalan begitu saja, tetapi kita tidak memberikan advokasi, artinya ada pencerahan yang bagus dari kita, mungkin bisa dikasih masukan, kemudian letak atau apa apalah kita. Saya kira Ibu Menteri dan jajaran lebih memahami itu.

Kemudian, selanjutnya masalah AA. Terus terang memang tidak hanya di Kementerian LHK, tapi semuanya disampaikan oleh Ibu Ketua tadi. Saya mengharapkan bahwa jika ada AA dan ada di LHK tolong diperhatikan Bu Menteri dan Dirjen agar Sarpras daripada teman-teman Polhut dan khususnya petugas di lapangan ini tetap menjadi prioritas gitu, jangan pula karena kena AA ya kasihan juga teman-teman. Saya menemui teman-teman yang bertugas di lapangan di daerah pemilihan saya, rata-rata bahasanya itu P3K, kemudian Sarprasnya, dan itu kan saya kira itu masih bisa kita anulir dan bisa kita berikan jawaban gitu, Bu Menteri. Dan ini mohon dipertimbangkan ketika hal-hal yang sangat krusial ini kena AA ini aja *automatic adjustment*.

Kemudian misalnya masalah MPA ini karena tadi disampaikan bahwa kemarau ini akan panjang, MPA tidak ada salahnya juga. Ini sangat produktif, Bu Menteri, Masyarakat Peduli Api ini di beberapa taman nasional itu bisa diefektifkan gitu menjelang kemarau yang katanya panjang ini. Dan bila perlu kepada taman nasional, beberapa taman nasional di seluruh Indonesia yang mungkin belum terbentuk MPA jika dimungkinkan MPA ini bisa terus ditambah dan lebih bagus. Memang agak terganggu dengan *finance support*-nya mereka, tetapi sekali lagi ini sangat bermanfaat mereka. Orang-orang di sekitar taman nasional itu yang dipercayakan menjadi MPA itu sangat bagus sekali, walaupun saya tahu *salary* atau pembayaran dari kita tuh kadang-kadang tergantung kerajinan dan yang lain-lain.

Saya kira ini Bu Menteri. Saya menyampaikan ini sangat penting sekali untuk kita semua. Sekali lagi untuk AA, mohon diperhatikan teman-teman yang bertugas di lapangan Polhut, kemudian MPA dan penyuluh agar tetap progresif dan semangat memberikan tugasnya walaupun AA-nya akan apa namanya terverifikasi oleh Ibu Sri Mulyani.

Terima kasih.

*Billahi fii sabililhaq fastabiqul khairat,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

WAKIL KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M. /WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Wa'alaikumsalam,

Pak dokter hewan Slamet, silakan.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Terima kasih, Bu Ketua.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Pimpinan dan seluruh Anggota yang saya hormati,
Ibu Menteri beserta seluruh jajaran yang saya hormati,

Saya ucapkan selamat menunaikan Ibadah Ramadan bagi yang menjalankan.

Langsung saja beberapa terkait dengan, pertama AA. Jadi, secara prinsip itu karena *given* ya kita menyetujui, hanya catatan kita untuk kegiatan yang berbasis kepada kemasyarakatan mohon itu kemudian untuk di tetap di menjadi perhatian bagi Bu Menteri dan jajarannya.

Yang kedua, saya juga menghimbau bagaimana kemudian kegiatan-kegiatan ke depan Ibu untuk kemudian memberikan apresiasi kepada aktivis-aktivis lingkungan supaya berhasil. Saya berkaca kepada ada satu LSM lingkungan yang terus kontak saya, tetapi kegiatannya hanya apa menanam-menanam saya tidak melihat hasilnya begitu ya, jadi kegiatannya menanam bersama, menanam bersama begitu. *Nah*, bagaimana kemudian ke depan aktivis-aktivis lingkungan ini diberikan satu apresiasi yang berhasil, jadi ini memang ya kalau cuma nanam bersama seremonial tidak akan pernah kemudian ini berhasil jadi itu yang.

Kemudian, saya juga menginformasikan bahwa fakta deforestasi walaupun disampaikan oleh Kementerian cukup turun, tetapi di lapangan juga terus berjalan, paling tidak ini yang terjadi baru tadi pagi saya mendapatkan informasi dari masyarakat. Kalau tidak salah sudah kita klarifikasi di bawah Situ Gunung tanah Taman Nasional Gede Pangrango, itu yang sedang dibangun untuk jalan atas nama wisata memang bukan wilayah itu tetapi kalau *nggak* salah di bawahnya itu Perhutani. *Nah*, terjadi juga apa penebangan-penebangan kayu-kayu yang sangat besar, Bu, *nah* ini terlepas dari apa nanti bagaimana kondisinya bukan buat ranah KLHK atau ini, tapi perlu kemudian dilakukan pengecekan. Kalau *nggak* salah Pak Wahyu itu juga bagian dari Perhutani ya baru tadi pagi ada yang mengirimkan video terkait dengan penebangan kayu-kayu yang sangat besar di bawah Taman Nasional Gunung Gede Pangrango.

Yang berikutnya, saya juga mengingatkan kalau saya salah mohon di luruskan bagi teman-teman Anggota. Kalau tidak salah di rapat sebelumnya terkait dengan masalah Freeport, waktu itu kita minta tim KLHK eh apa KLHK membentuk tim untuk turun ke lapangan dan kalau *nggak* salah disanggupi. *Nah*, mungkin kalau sudah ada hasil dari lapangan mohon disampaikan kepada kita dari Komisi IV supaya kita tahu perkembangan apalagi kita kemarin merencanakan sana ke sana tidak jadi di bawah Pimpinan Pak Sutrisno Bapak Sulaeman kemarin itu. Jadi, saya pikir mungkin karena waktu itu di dalam rapat disepakati akan dibentuk tim dan waktu itu kalau *nggak* salah ada, ada tenggang waktu, Bu Ketua, di kesimpulannya. Mohon disampaikan kepada kami terkait dengan perkembangan itu.

Dan terakhir, saya menyinggung terkait dengan perhutanan sosial yang ada di KPH Gundih, Bu, dari hasil apa kunjungan kami. Jadi, secara prinsip kami juga tidak menolak perhutanan sosial karena memang ini ya satu upaya dari pemerintah untuk memberi ruang kepada masyarakat kita yang memang butuh lahan. Tetapi kalau kejadiannya seperti Gundih ini saya kita khawatir, kita mengkhawatirkan jangan sampai perhutanan sosial yang lain, kebetulan ini juga *nggak* hadir ya dari Dirjenya tadi disampaikan oleh Bu Menteri. Jadi dari sisi saya ada kekhawatiran jangan sampai kemudian perhutanan sosial, perhutanan sosial yang lainnya nanti seperti yang saya temukan di lapangan ya. Jadi nanti juga kalau apa yang saya sampaikan kurang pas, mohon diklarifikasi jadi.

Saya menemukan beberapa fakta bahwa apa di dokumentasi di Komisi IV paling tidak mempunyai gambaran bagaimana kondisi sebelum itu dilakukan, dilepas menjadi perhutanan sosial, artinya penuh dengan pohon kayu putih yang memang luar biasa begitu ya yang waktu itu masih dikelola oleh Perhutani kalau tidak salah. Begitu kemudian dilakukan perhutanan apa pelepasan, saya kemarin miris melihat kemudian kondisi yang ke pohon kayu putihnya tidak ada sama sekali, ya kalau tidak ada sama sekali *nggak* lah, ada, tetapi tidak ya menjadi kekhawatiran yang kemudian itu berefek kepada kerobogan yang ketika musim hujan terjadi banjir. Dan kita memprediksikan ya humus kesuburan tanah itu akan terus berkurang karena kemudian begitu kena aliran hujan ya dan itu sudah muncul kemudian tanah-tanah yang berbatu tinggal muncul batunya sehingga tinggal menunggu waktu saja untuk kemudian kondisi itu tandus. Dan yang paling menurut saya mengkhawatirkan, jangan sampai ada modus yang ini kemudian harus menjadi perhatian dari Ibu Menteri dan seluruh jajaran. Modus yang saya maksud apa? bahwa di belakang seluruh perhutanan sosial ini ada korporasi yang siap *men-take over* dari tanah itu semuanya, itu yang sering kita khawatir seperti itu. Memang pengajuan atas nama awalnya adalah kelompok-kelompok petani hutan di sekitarnya, tetapi pada akhirnya kemudian itu dikelola oleh korporasi. Kami menemukan fakta itu, Bu, jadi tiga hari atau dua hari sebelum kunjungan tim kami yang dari komisi itu menemukan plang apa tanaman jagung yang itu milik korporasi, saat ke sana plang itu sudah tidak ada.

Jadi, kita tidak mempermasalahkan tanaman jagung, tapi bagaimana kalau ini sudah kemudian dikelola oleh sebuah korporasi yang pengelolaannya tidak lagi mempertimbangkan masalah ekologi, tidak lagi mempertimbangkan masalah tegakan-tegakan yang ada di sana ya. Saya ngobrol sendiri bagaimana kemudian seluruh tanaman yang baru ditanam itu mati bahasanya, Pak, memang ini tanaman dari, dari kami-kami sendiri, dari KLHK belum ada bibit sehingga saya usulkan, Bu, kalau katanya versi petani kalau ada bibit disiapkan dia siap menanam. Tetapi lebih dari itu, saya menemukan bahwa itu alasannya dan ini memang baru mencabut gitu ya karena saya memprediksi itu karena mau ada kunjungan dari Komisi IV ditanam lah kayu putih itu. Karena ini tanamannya tidak ada apa langsung nyabut tidak ditanam di *polybag*, sehingga wajar kalau ditanam tidak belum tumbuh bahasanya. Tapi di lokasi yang sama dibidang tidak di *polybag*, saya memoto sendiri di situ banyak kumpulan-kumpulan *polybag* hasil dari pensobekan dari tanaman-tanaman. Mohon hal-hal seperti ini ya jangan atas nama kemudian karena kita kunjungan

kondisinya dibuat sedemikian rupa sehingga kita seolah-olah menjadi puas, bukan itu yang kita harapkan, tetapi kita ingin perhutanan sosial tetap berjalan tetapi kondisi apa lingkungan ekologi kita tetap menjadi perhatian bagi kita semuanya dan itu yang, yang saya temukan jalan. Dan juga saya mendapatkan catatan dari, dari petani yang di sana bahwa apa petani juga tetap sewa ya. Ini, ini, ini pengakuan mereka mohon diklarifikasi, kalau secara aturan sudah betul ya juga tidak apa-apa hanya saya perlu diklarifikasi. Jadi petani tetap sewa, kemudian sewanya versi mereka juga masuk ke pengelola di sana. *Nah*, mohon nanti ini menjadi perhatian kita bahwa sekali lagi perhutanan sosial menjadi solusi yang baik untuk kemudian memberi ruang rakyat kita, tapi kalau pengelolaannya seperti ini kita tidak kebayang bagaimana kerusakan lingkungan kita.

Demikian, Bu Ketua.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

WAKIL KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M. /WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Wa'alaikumsalam,

Bu Menteri, untuk kasus yang terakhir ini nanti tolong dijelaskan ya, Bu, tentang siapa yang harus bertanggung jawab, siapa ini yang, yang melakukan misalnya menanam yang kelihatan banget kalau baru mau ditanam karena ada kunjungan Komisi IV, lalu kemudian ada proses sewa-menyewa misalnya seperti itu. Dan intinya terus kemudian ada korporasi yang kemudian setelah teman-teman datang tapi tidak ada plangnya, itu tolong dijelaskan ke kami.

Bapak-Ibu.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Termasuk kami menemukan kandang ayam permanen di sana Bu, karena saya orang ayam jadi dari jauh kandang ayam sudah kelihatan begitu.

Terima kasih.

WAKIL KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M. /WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Sudah bau, sudah berbau. Komunitas baru, orang ayam.

Bapak-Ibu,

Kita masih punya ini sudah jam 12.00 lebih. Kita masih punya banyak untuk pendalaman, jadi kita teruskan saja sampai jam 01.00 nanti kita lihat apa namanya untuk *break*, salat, dan butuh makan siang, yang butuh makan siang.

Pak Daniel Johan, silahkan.

F-PKB (DANIEL JOHAN, S.E.):

Iya, terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Selamat siang,
Salam sejahtera untuk kita semua,

Ketua, Pimpinan,
Bu Menteri dan segenap jajaran Pimpinan, Direktur, Pimpinan BUMN,

Yang pertama, Bu Menteri. Minggu lalu saya baru mendapat kunjungan dan menerima aspirasi, kami ingin menanyakan terkait dengan pembangunan PLTA di Batang Toru yang menjadi perhatian masyarakat sebenarnya cukup lama ya. Yang menjadi konsen kami adalah di situ hidup habitat orang utan yang dalam posisi dunia malah sudah darurat keberadaannya sehingga kami menanyakan sejauh mana kajian Amdal dari KLHK sehingga izin pembangunan PLTA tersebut bisa berjalan dan bagaimana perkembangan evaluasi sampai saat ini.

Yang kedua, kita mendorong bahwa peran Polhut itu menjadi sangat penting dalam menjaga habitat di hutan sehingga penguatan peran Polhut untuk menjaga kelestarian hutan maupun hewan di dalamnya menjadi sangat penting ya sehingga kami meminta kementerian bisa semakin memperhatikan, memberikan dukungan sarana prasarana bagi Polhut agar bisa bersama-sama dengan masyarakat di hutan dan di sekitar hutan bisa punya kekuatan untuk menjaga kelestarian, tetapi juga jangan sebaliknya justru posisi Polhut malah menyusahkan dan menakut-nakuti masyarakat sekitar hutan.

Yang ketiga, Raker sebelumnya saya sempat menanyakan masalah perluasan tanah Taman Nasional Gunung Palung di Kayong Utara. Kita minta bagaimana apakah sudah ditindaklanjuti, karena sampai saat ini masyarakat terus memberikan aspirasinya mereka kesulitan untuk bercocok tanam di lingkungan yang memang sudah mereka tempati selama dari nenek mereka, sudah cukup lama.

Kelima, Bu Menteri mohon Bang PeSoNa itu justru menjadi *benchmark*-nya Kementerian LHK di zaman Bu Menteri yang sangat bermanfaat dalam rangka menjaga alam, lingkungan, tetapi juga membuat masyarakat secara ekonomi sangat terangkat. *Nah*, kita minta justru tahun ini malah jumlahnya menurun. Kita bahkan mendorong agar program-program seperti Bang PeSoNa itu justru bisa semakin meningkat.

Terakhir, Bu Menteri. Tahun ini El Nino akan panjang ya dan akan berpengaruh terhadap termasuk pangan ke hutan apa kalau terjadi kebakaran hutan juga menjadi sangat penting, jadi kita benar-benar minta KLHK mengantisipasi El Nino yang panjang ya. Termasuk khusus di Kalbar memang

menjadi khas peran masyarakat swasta itu penting untuk membantu KLHK, membantu pemerintah, bahkan di dalam setiap mengantisipasi kebakaran lahan pemadam swasta ini menjadi basis utama yang selalu diundang oleh gubernur, selalu diundang oleh TNI dan Kepolisian ya. *Nah*, jadi aspirasi yang sempat saya kawal dan sampaikan kepada kementerian untuk mendukung sarana prasarana dari pemadam swasta ini mohon diperhatikan dan saya belum tahu apakah sempat ditindaklanjuti oleh Kesekjenannya.

Demikian Bu Menteri, Pimpinan. Saya mengucapkan terima kasih. Saya ingin menyampaikan ini boleh ya?

WAKIL KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M. /WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Iya, silakan.

F-PKB (DANIEL JOHAN, S.E.):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

WAKIL KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M. /WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,

Terima kasih, Pak Daniel.

Pak Sulaeman Hamzah, silakan. Silakan Pak Daniel diserahkan langsung ke Bu Menteri. *Foto dong.*

F-P.NASDEM (H. SULAEMAN L HAMZAH):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Pimpinan dan seluruh Anggota yang saya hormati,
Bu Menteri dan seluruh jajaran,
Para mitra kerja semuanya.

Saya ingin menimpali apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua dan menyusul tadi juga Pak Slamet bahwa keputusan rapat kita tanggal 6 Februari itu semua sepakat bahwa kita akan segera berkunjung ke lapangan, tapi memang sampai sekarang belum ada. Kesempatan ini saya mau jelaskan bahwa pada reses kemarin, saya juga didatangi tokoh masyarakat yang ada di Mimika, saya kebetulan sampai di sana mau ke lapangan, tetapi karena cuaca kurang mendukung sehingga tidak sempat turun lapangan. Dalam

perbincangan kami mereka sangat mengharapkan untuk segera tim dari Komisi IV bisa turun berkunjung ke lapangan untuk melihat langsung.

WAKIL KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M. /WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Saya boleh menyela.

Jadi kemarin saya diskusi dengan para Pimpinan dan reses depan ini rencananya ke Papua ya Pak, mana Pak Thomy sudah, tadi barusan pagi Papua, Malut, sama Kaltara, jadi Papua, Papua menjadi salah satu.

F-P.NASDEM (H. SULAEMAN L HAMZAH):

Terima kasih Ketua.
Jadi.

WAKIL KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M. /WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Nanti kalau, saya nanti yang ke sana.

F-P.NASDEM (H. SULAEMAN L HAMZAH):

Terima kasih, Ketua.

Jadi ini memang penting sekali, karena dampak dari, dampak dari limbah *tailing* yang kemudian merusak 3 distrik ada 23 kampung yang terdampak di sana ini memang betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, kunjungan yang tadi disampaikan, Bu Ketua, saya sangat mengharapkan, pasti saya akan sampaikan lebih awal ke masyarakat untuk apa namanya mempersiapkan menunggu kita di sana.

Yang kedua, Bu Menteri. Di perkembangan sawit yang kita banggakan ini memang di balik itu ternyata meninggalkan masalah yang besar. Di Papua Selatan, perusahaan sawit yang ada di sana itu juga ternyata memang diberi janji oleh perusahaan yang sampai sekarang itu juga tidak terealisasi sejak membuka lahan itu. Pada waktu kunjungan ke sana saya berkunjung ke lapangan itu mereka menjelaskan bahwa perusahaan sudah memfasilitasi anak-anak sekolah dibuatkan asrama dan lain sebagainya, ternyata itu omong kosong semuanya. Saya didatangi kemarin pada waktu reses di Merauke, mereka menyampaikan bersama-sama dengan pengacaranya minta supaya ini segera ditindaklanjuti karena ternyata ini membahayakan di masa depan, kalau nanti semua bereaksi untuk bergerak menutup usaha itu, itu akan lebih ramai lagi. *Nah* karena ini, kesempatan ini saya sampaikan mudah-mudahan nanti kita ada agenda khusus misalnya ke lapangan, tapi saya juga menunggu apa pengacaranya melengkapi data yang mereka sampaikan kepada saya baru bisa data itu saya akan sampaikan ke Bu Menteri sekaligus Pimpinan Komisi untuk nanti kita bisa bicarakan lebih lanjut.

Yang berikut tentang langkah-langkah yang sudah diambil oleh KLHK menyikapi atau menindaklanjuti kunjungan spesifik yang dilaksanakan. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan, kami tentu mengapresiasi dan ini bagian dari tanggung jawab kita bersama untuk hal-hal yang terjadi di lapangan.

Dan selanjutnya untuk *automatic adjustment* sebagaimana tadi sudah disampaikan, secara prinsip kami, fraksi Nasdem setuju dengan tentu memperhatikan hal-hal yang terkait dengan kepentingan masyarakat banyak.

Terima kasih, Ketua.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

WAKIL KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M. /WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Wa'alaikumsalam,

Baik terima kasih Pak Sulaeman Hamzah.

Selanjutnya, Pak Daeng Muhammad.

F-PAN (DAENG MUHAMMAD, S.E., M.Si.):

Terima kasih, Pimpinan.

Yang saya hormati Pak, Bu Menteri,

Saya dari Fraksi Partai Amanat Nasional.

WAKIL KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M. /WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Belum kenalan ya?

F-PAN (DAENG MUHAMMAD, S.E., M.Si.):

Saya warga baru, Bu Menteri.

WAKIL KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M. /WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Oh ya, silakan kenalan dulu Pak Daeng.

F-PAN (DAENG MUHAMMAD, S.E., M.Si.):

Udah, tadi kan udah disebutkan namanya Daeng. Saya Fraksi Partai Amanat Nasional dari Dapil VII Jabar Bekasi, Karawang, Purwakarta.

Bu Menteri, saya ingin bertanya sebetulnya. Kebetulan karena saya warga baru di Komisi IV, jadi belum terlalu banyak mengenal, tapi saya ini yang mewakili Dapil VII Jabar itu mewakili ada dua hal sebetulnya di sana berkaitan dengan tanah kehutanan.

Pertama, yang saya tanyakan adalah berkaitan dengan status tanah kehutanan Muara Gembong, karena tidak lagi sekarang dikuasai oleh Perhutani menjadi tanah katanya hutan sosial yang diambil alih sekitar 1,1 juta hektar itu.

Yang kedua, tanah Sangga Buana atau kota tandingan, itu tanah eks verponding 53 Tegalwaru Landen. Dalam catatan saya, ketika saya dulu menyusun kaitan dengan hukum perdata, itu luasnya dulu sekitar 45.000 hektar itu menjadi objek retribusi atau re-dis, objek retribusi tanah berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 60 itu sekitar 22.000 hektar atau 22.000 hektar sudah di menjadi objek atau dibagikan.

Pertanyaannya, saya ingin bertanya berkaitan, pertama, Muara Gembong. Muara Gembong itu arah kebijakan Kehutanan itu mau dibawa kemana? Pertama, kalau itu memang tanah Kehutanan, mau rekonstruksi ulang menjadi hutan mangrove, memang mangrovenya sudah tidak ada bahkan menjadi tambak-tambak di sana.

Kedua, saya ingin membuka satu wawasan sejarah, Bu. Saya melihat peta tahun 1818, Muara Gembong itu sudah ada pemukiman penduduk. Setelah merdeka tahun 1958 terjadi nasionalisasi yang dilakukan oleh pemerintah kita maka Muara Gembong di *cooped* menjadi tanah kehutanan, tapi sebelum merdeka sudah ada penduduk yang bermukim di sana dan tinggal di sana dan itu dimasukkan pada peta milik kehutanan. Saya minta agar Bu Menteri memberikan kepastian kepada mereka. Kalau itu sudah di *take over* dari Perhutani menjadi tanah Kehutanan dan sekarang menjadi direncanakan menjadi tanah hutan sosial atau apakah namanya, saya minta ada kejelasan terhadap alas hak tanah di sana. Jangan sampai kalau kita ke BPN atau Badan Agraria di sana Muara Gembong itu di plat merah semua, walaupun sebelum merdeka sudah waris apa mereka turun-temurun tinggal di sana, mereka dianggap sebagai tanah kehutanan. Ini yang, Bu, supaya Ibu memberikan kejelasan terhadap tanah Muara Gembong, tapi jangan ketika masyarakat ingin punya lasak di sana dan luasannya tidak besar juga, itu sulit. Tapi Muara Gembong sekarang menjadi objek pihak ketiga dijualbelikan, bahkan juga perlu kejelasan dualisme antara klaim Kehutanan dan BPN. Di sana tuh banyak tanah timbul yang sekarang lagi banyak diukur oleh pihak ketiga, bahkan tanah-tanah kehutanannya pun sudah dijual garapan harganya 2000, 3000, 4000 sampai Rp5.000, saya *nggak* tahu duitnya siapa yang terima, *gitu loh*.

Nah ini, ini menjadi PR kita bersama, ini aspirasi Dapil yang saya harus perjuangkan karena apa? orang Muara Gembong yang tinggal sebelum merdeka di sana butuh kepastian hukum terhadap alas hak mereka. Mereka tinggal di sana turun-temurun, tapi mengurus sertifikat hak milik tidak bisa, karena ketika nasionalisasi itu diklaim menjadi tanah kehutanan. Tapi, satu sisi karena kehutanan dan Muara Gembong itu, Ibu perlu paham sekarang sudah dikuasai

banyak oleh pihak ketiga. Sudah banyak dibangun hal-hal yang menurut saya terus terang saja kalau bicara hutan sudah tidak ada hutan lagi, semua jadi tambak. Bahkan Habitat Lutung Jawa yang ada namanya di Beting itu sedang mulai terancam sudah. Jadi saya jangan sampai pikiran saya kemana-mana bahwa jangan-jangan ada *grand* desain Muara Gembong, kalau sama masyarakat tidak boleh tapi akan dikuasai oleh konglomerasi dan lain-lain.

Kedua, berkaitan dengan Sangga Buana. Kebijakan terhadap objek redis atau objek tanah yang didistribusikan berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 60 itu luasannya ada batasannya sampai berapa, saya pengen tahu. Terus sisanya yang masih puluhan ribu hektar itu, itu mau diapain? karena sekarang menjadi hamparan yang tidak berguna, kayunya tidak ada, hutannya tidak ada menjadi savana yang dimanfaatkan oleh orang-orang di kavling-kavling oleh orang-orang, bahkan konglomerasi di sana sudah menguasai ada yang sampai ribuan hektar. Ini catatan dari saya, Bu, saya ingin penjelasan karena ini aspirasi dari masyarakat di sana, dan saya perlu sampaikan ke mereka dan mudah-mudahan ada solusi yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan yang memberi rasa keadilan sesuai dengan Pancasila sila kelima.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

WAKIL KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M. /WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Wa'alaikumsalam,

Pak Hermanto.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M):

Terima kasih, Bu Ketua.

Pimpinan, Anggota Komisi IV,
Bu Menteri bersama jajaran,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Pertama, saya ingin menyampaikan perkembangan pertambahan di kawasan pantai Sumatera Barat, itu mengalami perluasan yang menurut saya itu sudah perlu patut dipantau, perlu patut diawasi secara ketat, karena sudah sampai tingkat mengkhawatirkan. Karena kawasan Sumatera Barat itu, itu adalah kawasan gempal dan potensi tsunaminya sangat tinggi. Dan bila terjadi satu hal yang tidak kita inginkan terkait dengan gempa itu, itu bisa jadi kawasan yang sudah terbuka akibat tambang itu, itu gelombang tsunaminya bisa mencapai ke daratan yang cukup jauh gitu dan di balik itu adalah perumahan penduduk, kawasan sawah, kebun, dan itu bisa merusak ekosistem di sana. Saya mohon ini perhatian bahwa kawasan itu sangat sudah sampai pada

tingkat rawan ya, *nah* ini apakah itu semua tambak yang ada di situ itu sudah berizin ataukah memang menjadi kewenangan siapa di situ. Itu yang pertama, Bu.

Yang kedua, di Sumatera Barat itu sekarang juga berdasarkan laporan dari masyarakat *illegal logging* dan *illegal mining* itu sudah sangat mengkhawatirkan juga. Apalagi ada arus lalu lintas tambang dari Jambi ke Sumatera Barat itu sudah sangat tingkat mengkhawatirkan, *nah* ini arus lalu lintas tron-ton yang bawa bahan tambang itu sudah sampai pada tingkat masyarakat protes dan itu sudah merusak lingkungan. Masyarakat Jambi itu telah menghadang semua truk-truk itu untuk tidak beroperasi, *nah* ini apakah ini kita biarkan saja atau memang ada perlu tindakan yang tegas, perlu penegakan aturan. Dan perjalanan mobil-mobil tron-ton itu dari Jambi ke Sumatera Barat sampai ke Teluk Bayur dan ke arah mana yang lain-lainnya itu sudah sampai pada tingkat melebihi tonase dari bawaan truk itu dan itu mempercepat proses kerusakan jalan di sana ya dan itu sangat mengganggu arus lalu lintas. *Nah*, saya minta ini juga kementerian punya perhatian khusus di sana untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan lebih parah.

Kemudian yang ketiga, saat kami berkunjung Kunspek ke Bengkulu ke daerah, itu terjadi di masyarakat ada tingkat kekhawatiran masyarakat mengolah lahannya itu diperkarakan oleh perusahaan. *Nah*, masyarakat ini sangat khawatir karena satu-satunya sumber dari penghasilan masyarakat itu adalah dari usaha, usaha pertanian yang ada di sekitar kawasan itu. *Nah*, kami minta supaya ini juga sudah terjadi ya, ada pengalihan tanda batas yang seharusnya itu adalah lahan masyarakat oleh perusahaan itu dialihkan dan sehingga lahan masyarakat itu menjadi kawasan perusahaan dan inilah terjadi konflik antara masyarakat dengan perusahaan di sana. Kami minta ini supaya Bu Menteri ini bisa melindungi masyarakat petani, pekebun, peternak yang ada di kawasan itu untuk menyelamatkan masa depan hidup mereka. *Nah*, ini yang kami temukan pada saat kunjungan ke Bengkulu.

Nah, kemudian yang keempat ini temuan terkait dengan kunjungan di NTB ya itu ada PT Amman di sana yang membuang limbahnya ke laut. Pada saat itu kami melakukan pendalaman, dan ternyata di sini juga ada laporan dari Bu Menteri bahwa pembuangan limbah dari PT Amman itu sudah melampaui batas ketentuan yang ditetapkan. Dan kami menggambarkan pada saat itu bila terjadi penggalian dan pembuangan hasil galian itu ke laut, seunggukan gunung, maka akan terjadi juga penumpukkan tanah di bawah laut itu sebesar gunung itu juga pasti itu akan terjadi kerusakan lingkungan, biar bagaimanapun juga pengawasannya itu pasti akan merusak lingkungan. *Nah*, kami minta supaya ada tindakan-tindakan yang tegas terhadap cara-cara mengatasi bagaimana pembuangan limbah itu tidak berdampak pada lingkungan.

Terakhir, kami minta supaya juga terkait dengan *automatic adjustment* itu diusahakan alokasinya sebesar-besar mungkin untuk kepentingan masyarakat. Dan kedepannya kami juga minta supaya sistem anggaran kita ini tidak ada, tidak ada lagi dikenal dengan *automatic adjustment*, ini sangat mengganggu kita. Kenapa mengganggu? karena ketika ada kebijakan *adjustment* ini, ini berakibat terjadi penghambatan alokasi dan perlambatan

daya serap, sehingga ini adalah mengganggu tingkat perputaran ekonomi masyarakat. *Nah*, kami minta kepada Bu Menteri supaya yang namanya istilahnya *adjustment*, ataukah cadangan, ataukah *refocusing* dan lain sebagai macamnya itu, itu Bu Menteri bisa sampaikan bahwa ini adalah tidak efektif untuk pembangunan di sektor kehutanan dan lain sebagainya.

Demikian, Bu Ketua.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

WAKIL KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M. /WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Automatic adjustment namanya Pak.

Pak Ravindra, silakan.

F-PG (RAVINDRA AIRLANGGA, M.S.):

Assalamu'alaikum,

Izin, Ibu Menteri beserta jajaran, para Direksi BUMN.

Pertama, saya ingin menyampaikan dua hal. Pertama-tama saya mengapresiasi kunjungan KLHK yang melakukan peninjauan terkait PT Freeport Indonesia. Izinkan saya *share* beberapa temuan yang saya pandang menarik. Pertama, di muara sungai, sungai Ajkwa, Ajkwa itu merupakan tempat muara *tailing*, secara visual mangrove di sekitar sana terlihat sehat. Kemudian berdasarkan ujian uji *tailing* menggunakan metode Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP) *tailing* itu masih lebih, masih lebih rendah dari baku mutu karakteristik beracun dan ketika ditinjau di tempat tanggul di mana muara itu akan mengalir ke tanggul, retensi ini sedang ditingkatkan untuk menahan aliran *tailing* ini. Pertanyaan saya, apakah ada pengujian atau inspeksi berkala yang memastikan *tailing* yang dilepas itu selalu dalam batasan kadar yang aman dan ini lebih penting lagi seperti kasusnya di tempat Pak Hermanto di mana itu adalah *tailing* laut dalam.

Kedua, saya ingin menanyakan tentang *automatic adjustment*. Kami memperhatikan bahwa *automatic adjustment* pada Eselon I dilaksanakan secara merata dengan dampak *automatic adjustment* terbesar pada Dirjen Planologi dan Lingkungan sekitar 22%. Kami berharap ini tidak berdampak pada kinerja untuk penyelesaian terkait kawasan hutan. Dan kemudian kami juga menyesal terjadi *automatic adjustment* karena kami di daerah sangat bergantung pada bantuan KLHK juga, karena sampah misalnya Kabupaten Bogor mencapai nilai 2800 ton per hari dan Dinas Lingkungan Hidup hanya mampu mengangkut 25% sehingga bantuan dari Ditjen Pengelolaan Limbah itu sangat berarti bagi kami.

Terima kasih.

WAKIL KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M. /WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Baik. Terima kasih.

Ini harusnya Pak Alimin dulu, tapi *nggak* ada. Bang Johan. Makan siang.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T):

Terima kasih, Bu Ketua.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Pak Ketua, Bu Wakil Ketua yang saya hormati beserta Anggota, Bu Menteri beserta seluruh jajaran di Kementerian LHK,

Pertama, soal tindak lanjut. Saya sebenarnya tidak bicara lagi ini karena sudah banyak, tetapi saya lihat penjelasan tertulis ini kita agak sedikit mohon maaf Bu Menteri agak sedikit kecewa gitu. Nampak bahwa Kementerian Lingkungan Hidup itu meremehkan ya, saya baca saja yang Ibu tulis di sini bahwa telah dilaksanakan rapat penyampaian tindak lanjut hasil audit PT AMNT pada tanggal 16 Februari 2023 dengan kesimpulan bahwa:

- a. Auditor belum berhasil melakukan verifikasi terkait sebaran *tailing* yang terindikasi keluar dari garis batas izin tapak *tailing* karena terkendala dengan peralatan yang tersedia.

Ini gampang banget jawabannya, Bu, Ibu itu berbicara atas nama negara saya ingatkan, masa negara sebesar ini yang dikonstitusinya *ngomong* bahwa setiap warga negara memiliki hak atas lingkungan yang sehat. Ini temuan sudah mulai diselidiki sejak tahun 2001 Bu ya, sudah sejak 2021, sudah ada informasi awal bahwa PT Amman Mineral sedang dalam proses audit lingkungan hidup yang tujuannya adalah mengevaluasi dan memverifikasi kepatuhan dan ketidakpatuhan fasilitas apa *tailing* dalam laut itu terhadap peraturan undang-undang termasuk mengidentifikasi dan mengkonfirmasi kejadian kerusakan pencemaran dan/atau kecelakaan lingkungan hidup.

Nah, waktu di Mataram kemarin ketika kita panggil, dijelaskan kita sama salah satu petugas Ibu kepada kami bahwa sedang dilakukan konfirmasi karena berdasarkan peta *modeling* yang disampaikan bahwa sebaran *tailing* diduga telah melebihi batas izin. Jadi, kebetulan waktu itu saya yang melihat pertama itu Bu ada indikasi dalam peta model itu sudah keluar dari garis merah yang, yang ditetapkan itu. *Nah*, proses audit lingkungan hidup sedang berlangsung dan belum mendapatkan surat pernyataan dari KLHK bahwa audit ini sudah apa sudah atau belum dilaksanakan. *Nah*, tapi jawaban di sini, Bu, belum bisa memberikan keterangan karena kita kekurangan alat.

Bu, cukup Buyat saja Bu jadi tragedi, tragedi kita. Jangan buat daerah saya, Sumbawa itu yang kecil itu, itu tercemar dengan *tailing* PT Amman Mineral ini dan isu ini sejak zaman PT Newmont Nusa Tenggara dulu, Bu. Jadi jangan jawab kami rakyat ini dengan bahwa negara tidak punya alat, untuk

mengeluarkan sebuah pernyataan dari kementerian bahwa betul dugaan dari peta *modeling* itu keluar dari apa nama dari, dari apa dari batas izin yang dikeluarkan, karena kalau itu keluar dari batas izin, Bu, tercemar kita. Pulau Sumbawa itu kecil dari, dari Republik ini kecil, Bu. Ini kalau misalnya lautnya keluar dari situ, kita tercemar, naudzubillah ya. Cukup Buyat, sekali lagi cukup Buyat di Minahasa itu menjadi kasus ini. Waktu itu kami ingatkan PT Amman Mineral, Pak, Ibu Menteri, bahwa mitra anda bermitra dengan kami bukan dari sisi, bukan dari sisi teknis tambangnya, tapi kalian bermitra dengan Komisi IV itu dari sisi aspek lingkungan hidupnya. Karenanya, kami tidak akan berbicara tentang teknik tambang yang kalian lakukan, Komisi IV hanya konsen jangan rusak lingkungan hidup. *Nah*, karenanya, sekali lagi mohon perhatian, diberi perhatian persoalan ini agar masyarakat di Sumbawa itu tidak tercemar akibat ulah orang yang mengambil sumber daya alamnya yang merupakan kekayaan rakyat dan tanah Sumbawa itu, itu dengan cara membuang *tailing* di tengah laut dan itu kemudian melebar dari batas izin yang di berikan, itu yang pertama.

Yang kedua, *automatic adjustment* tetap saya prinsipnya, Bu, Kementerian Pertanian kemarin juga sudah bilang sekarang sudah bilang, saya tidak setuju dengan proses ini ya. Apalagi misalnya, kalau kita lihat bahwa memang persoalan kita hari ini kan soal krisis energi ya kan, sampah, dan lain sebagainya. Kita lihat saja data di timbunan sampah dalam setahun kita 67,8 juta ton, baru dikelola 35,9 juta ton artinya yang belum masih ada 3,9 juta ton dengan anggaran hanya Rp200 miliar per tahun. Ini sudah sedikit, terus kemudian kita *automatic adjustment* lagi, ini kan menjadi soal gitu, padahal ini adalah amanat konstitusi. *Nah*, kalau kemudian kita kalikan ini, Bu Ketua, jadi 5 tahun ya dengan anggaran sekian ini dengan posisi timbunan sampah sekarang, maka akan ada 150 juta ton tumpukan sampah gitu. Ya, mungkin bisa dicari modelnya Bu Menteri, ya mungkin kita perlu serahkan ke swasta atau apa misalnya gitu ketika kita sebagai negara tidak bisa lagi mengelola itu karena kita tidak memberikan perhatian satu, atau dari sisi dukungan anggaran yang kurang, mungkin bisa kita apa namanya serahkan kepada swasta daripada juga kita impor sampah setiap tahun.

Nah, terus yang apa yang ketiga. Saya sudah WA Pak, Bu Menteri, sama Pak Sekjen ya. Bu Ketua, di daerah saya di Dompu itu ada sebuah SMK kreatif, jadi siswanya itu bersekolah dengan membayar sampah, jadi mereka tidak ditarik SPP-nya gitu dengan membawa, membawa sampah dari rumah mereka kemudian bisa bersekolah. Saya sudah sampaikan foto-fotonya ke Bu Menteri, videonya juga sudah dan *alhamdulillah*, Bu Menteri, merespon dengan cepat, terima kasih Bu Menteri, Pak Sekjen ya, tinggal kita tunggu respon di lapangannya ya. Butuh dukungan mesin *press* sampah saja, Bu Ketua.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

WAKIL KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M. WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,

Pengelolaan sampah ini kita bisa pakai di fungsi kebijakan juga ya, Bu Menteri.

Jadi seperti yang dilakukan oleh teman-teman apa yang di SMP, SMA ya? SMK, SMK yang di tempat di Dompu itu, itu juga salah satu cara juga. Beberapa waktu yang lalu saya ingat pernah meminta untuk di sekolah diwajibkan misalnya menanam pohon misalnya seperti itu atau misalnya, merdeka belajar ya salah satunya itu. Artinya sebenarnya ada banyak sekali di daerah inovasi-inovasi yang menyelamatkan bumi dengan cara yang tidak terlalu mahal juga gitu.

Bu Riezky Aprilia, promovendus berikutnya.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Aamiin. Terima kasih Ibu Doktor Anggia.

Saya mau langsung *to the point* saja, Ibu Menteri. Pertama, hasil kemarin kunjungan di Dapil, saya minta perhatian Ibu Menteri untuk *deliver* kepada Pak Sekjen KLHK untuk segera mengeluarkan SK Tim verifikasi program kemitraan konservasi yang sampai saat ini *mandek* ya karena masih menunggu SK dari Kesekjenan. Mohon maaf, ini juga kemarin sempat disampaikan waktu ada kunjungan Ibu Ketua DPR RI di Sumatera Selatan juga, jadi kami menindaklanjuti hal tersebut ya.

Kedua, terkait juga dengan peta rehabilitasi hutan lindung. Saya rasa dengan melihat situasi hari ini, itu mungkin saya pengen tahu juga *annually*-nya direvisi itu sesuai dengan RT/RW kabupaten, kota itu seperti apa sih gitu, karena banyak, banyak hal yang apa menjadi apa ya permasalahan antar masyarakat juga dengan pada saat penetapan batas dan lain-lain gitu pada saat di lapangannya.

Nah, yang ketiga. Tadi disampaikan Freeport terjadi apa musibah di Freeport mungkin juga tadi, ada juga dari Newmont yang juga mesti diantisipasi. *Nah*, kemarin di Sumatera Selatan pun saya jarang sekali berbicara dalam konteks spesifik Dapil ya, tapi ini harus saya sampaikan. Sumatera Selatan sering kok dikunjungi oleh KLHK ya, tapi pada kenyataannya kemarin musibah di Kabupaten Lahat ini terkait tambang dan hutan yang sudah habis. Mungkin ada baiknya dievaluasi lah mungkin yang ilegal izin, karena ini sudah merugikan. Musi Rawas, Kabupaten Musi Rawas itu jalan provinsi sampai putus, tidak bisa diakses. Perbatasan dari Lubuklinggau ke Bengkulu putus juga, jalan. Saya tidak mau kita menyalahkan alam, jangan pernah sekali-sekali menyalahkan alam, tapi harusnya dengan *climate change* yang seringkali juga *annually* dihadiri oleh Kementerian LHK ini tahu dong antisipasinya gimana kan gitu. Apakah program mangrove ini berhasil dengan naiknya debit air? ini menjadi pertanyaan. Kan berarti belum nahan, mungkin ya mungkin mangrove-nya baru ditanam, airnya udah naik, jadi hilang lagi mangrove-nya kan gitu kali ya gitu. Mohon maaf Pak Hartono ya Kepala BRGM, saya *mah ngomong* apa adanya aja gitu.

Jadi, saya harap Ibu Menteri di forum yang terhormati ini, apakah kita harus menunggu musibah-musibah lainnya sampai baru ada langkah antisipasi. Dirjen PPI juga mungkin apa nih solusinya, ya. DAS, apakah DAS ini masih Pak Sekjen juga ya? eh Pak Sekjen apa? oh ada, Ibu dari DAS, Pak Sekjen KSDAE ya? masih ya? belum ada ininya, belum. Pak Ruandha juga masih? ya cuma ngingetin aja, takut lupa, karena kalau bablas kan bisa *ampe* lama kan *nggak* baik juga untuk apa roda pemerintahan kan gitu.

Jadi, mungkin saya mengingatkan tadi. Pertama, masalah kemitraan konservasi. Kedua, masalah peta yang *annually* ini seperti apa ya. Dan yang ketiga, tolong dengan segala rasa hormat karena korbannya juga banyak kemarin itu, musibah itu, kita mau nunggu korban berapa banyak lagi terkait tambang dan perkebunan ini *gitu loh*, perkebunan ya perkebunan sawit rasanya tuh ya. Mungkin Pak Dirjen Gakkum itu coba dicek aja itu kebun sawit dengan nama Juanda sawit, Sinarmas, kalau *nggak* ada faedahnya buat masyarakat, buat jalan aja susah, *mah* ya udah coba aja dievaluasi gitu.

Terima kasih Pimpinan.

WAKIL KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M. /WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Bu Nuraeni, silakan.

F-PD (HJ. NUR'AENI, S.Sos, M.Si.):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Pimpinan saya hormati, serta Anggota,
Bu Menteri, Pak Sekjen, beserta jajaran,

Kaitan *automatic adjustment* ini kalau menurut saya menyakitkan Bu Pimpinan, kalau bicara tidak setuju ya pasti teman-teman juga tidak setuju. Di saat kondisi Indonesia saat ini perubahan iklim yang luar biasa, pangan yang semakin susah, tapi *automatic adjustment* tidak ada, tidak ada pengecualian dan tidak ada keberpihakan ke sektor pangan serta ke sektor kehutanan, lingkungan hidup, dan lain sebagainya. *Nah*, tentu ini semangatnya harus diperjuangkan mudah-mudahan Pimpinan bisa merekomendasikan kepada Pimpinan DPR agar politik anggaran sesuai fungsi daripada Anggota DPR ini juga bisa terlihat, tidak hanya sebagai cap stempel dari eksekutif.

Dan berikutnya bahwa tindak lanjut yang telah dilakukan apresiasi Bu Menteri, khususnya menyoroti kaitan dengan tentang *illegal* kayu arang yang ada di Kepulauan Riau. Aktivitas yang dilakukan ilegal kayu arang di Kepulauan Riau, di mana memang ditemukan kita menginginkan bahwa pengusaha arang ilegal ini untuk bisa terpenuhi perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tindak lanjut yang dilakukan bahwa di sini disampaikan terkait perizinan, pengelolaan arang ini sesuai dengan Permen LHK Nomor 8 Tahun

2021 khususnya Bab V. Kalau saya baca dari Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021 ini tidak menegaskan bahwa jenis kayu arang ini untuk bisa dilakukan dibuat perizinan, karena yang diatur di Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021 hanya menyebutkan kayu hutan serta yang lain. Sementara itu, jenis kayu yang dihasilkan dari Mangrove ini kan tidak tertera, maksudnya ini harus ditegaskan jangan sampai, saya *sih* setuju ya untuk bisa dilakukan legalisasi terhadap pengolahan kayu mangrove misalkan kalau arahnya mau ke sana. Akan tetapi, di aturan regulasi ini harus dikuatkan, jadi tidak mengambang, harus tegas disampaikan di sana, karena yang lain itu udah masuk ke sana. Kalau yang dikatakan kayu hutan berarti artinya bulat, sementara itu keberadaan mangrove ini kan hanya berada di pesisir pantai gitu. Ini koreksi dari saya, Bu Menteri, mudah-mudahan bisa dievaluasi.

Selanjutnya, dari berbagai problematika kaitan dengan kerusakan hutan, kerusakan lingkungan, persampahan, dan sebagainya. Kalau saya mengharapkan bahwa ke depan Kementerian LHK ini tidak hanya berbicara melakukan rehabilitasi saja baik itu bentuk penanaman mangrove ataupun kayu-kayu yang ada di hutan-hutan kita, akan tetapi bagaimana ke depan juga diimbangi oleh pemeliharaan. Saya tidak melihat itu Bu Menteri, bagaimana ke depan KLHK juga gencar untuk melakukan pemeliharaan baik untuk hutan sosial maupun untuk kondisi lingkungan hidup. Kaitan dengan DASHL ya, PDASHL ini juga perlu dilakukan untuk bisa memantau optimalisasi pemeliharaan. Saya melihat bahwa DAS yang dilakukan oleh Kementerian LHK tidak dilakukan pemeliharaan secara rutin yang dulu, Bu Menteri, mohon maaf, dari sisi kelembagaan masing-masing UPT yang ada di KLHK ini di tiap-tiap daerah itu luar biasa fungsinya, termasuk di Banten. Kalau sekarang, BPDASHL aja di Banten ini nyaris tak terdengar bahkan kantornya juga sudah tidak ada, bagaimana mau bekerja untuk bisa melakukan apa pendangkalan yang terjadi dilakukan misalkan dikeruk dan sebagainya, ini sangat merugikan masyarakat serta petani kita.

Dan yang lain, yang lainnya. Saya juga mendorong bagaimana kebijakan serta regulasi yang ada di Kementerian LHK ini juga bisa terintegrasi dengan daerah, tidak menutup kemungkinan daerah juga tidak tahu atau tidak nyadar bahwa apa yang sudah diterbitkan oleh Kementerian LHK tersosialisasikan atau tidak di daerah-daerah, karena tidak luput pantauan Kementerian LHK sementara persoalan-persoalan sampah dan lingkungan ini yang merasakan adalah daerah-daerah Bu Menteri. *Nah*, ini saya mendorong semoga dari KLHK juga secepatnya untuk bisa melakukan kerja sama yang baik serta sistem kebijakan dan program yang terintegrasi.

Terakhir, untuk kaitan dengan regulasi, Bu Menteri, kaitan sistem pengelolaan sampah di mana 3R yang digembor-gemborkan ini nyaris tak terdengar lagi, daerah-daerah juga masih saja mempergunakan sampah-sampah plastik yang dari botol mineral dan sebagainya. Ini sebetulnya bagus, Bu Menteri, hanya saja sosialisasinya belum masif. Kalau misalkan SDM yang ada di Kementerian LHK masih kurang, bisa mungkin bekerja sama dengan Anggota DPR di Dapilnya masing-masing untuk mensosialisasikan hal tersebut.

Terakhir untuk Dirjen BP, itu apa masalah persampahan, Bu Vivien. Mohon kiranya karena memang apa yang disampaikan teman-teman juga banyak persampahan yang memang kurang dikelola dengan baik, dibuang sembarangan di laut, di aliran sungai, dan lain sebagainya. Saya minta untuk Dapil saya diadakanlah apa namanya untuk tempat-tempat bak-bak sampah, harganya ini sangat murah, tapi berarti dan bermanfaat untuk masyarakat.

Terima kasih.

WAKIL KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M. /WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Baik. Terima kasih Ibu Nuraeni.

Bu Saadiah, ini akhir-akhir perempuan semua.

Silakan Bu Saadiah, setelah ini Bu Alien.

F-PKS (SAADIAH ULUPUTTY, S.T.):

Dukungan terhadap pemerintah ini, Bu Ketua.
Terima kasih, Bu Ketua.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Selamat siang,
Salam sejahtera bagi kita sekalian,

Ibu Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup yang saya hormati,
Pak Sekjen, seluruh Dirjen KLHK yang saya hormati,

Saya *highlight* satu hal saja, Bu Menteri, soal program restorasi mangrove, ini kebetulan juga Kepala BRGM ada. Soal target rehabilitasi mangrove yang ditetapkan oleh Presiden ya di Perpres Nomor 120 Tahun 2020 itu seluas 600.000 hektar ya, hingga tahun 2021 seperti yang dilaporkan itu capaiannya 34.911 hektar gitu.

Pertanyaannya, kita punya beberapa hasil penelitian yang disampaikan oleh salah satu Universitas di Sumatera Utara itu mempublikasikan bahwa kawasan yang cocok untuk restorasi mangrove itu hanya sekitar 193.367 hektar atau sekitar 30% dari kawasan dari target yang ada. Dulu itu BRG juga telah mungkin gagal gitu ya merealisasikan restorasi gambut 2 juta hektar dan hanya terealisasinya itu 40%-nya dan berdasarkan penelitian di atas ini apakah BRGM akan mengulangi hal yang sama seperti pada gambut ini. Dan ya kita mengingatkan agar KLHK tidak sekedar buat target lah begitu dan ini terkesan agak bombastis lah ya seperti dalam Perpres ini yang harapannya tidak sekedar keinginan saja, tapi kita juga ingin mendapatkan satu penjelasan yang detil seperti apa, apa namanya konsep pengembangan mangrove itu sendiri.

Nah, khusus untuk mangrove di daerah pesisir-pesisir Pak BRGM, saya lihat di data ini di halaman 14 ini ini revitalisasi di 7 provinsi ya, di rapat pernah kita rapat di sini itu 9 provinsi, sekarang di 7 provinsi dengan alokasi anggaran Rp21 miliar. 27 provinsi yang saya soroti di sini ini adalah mengapa provinsi-provinsi di daerah-daerah pesisir tidak masuk gitu, *nah* apakah itu apa namanya dia di koordinasikan dengan KLHK dengan KKP atau Menko Marves untuk Tupoksi yang sama ataukah dia ada juga dalam apa tanggung jawab BRGM, meskipun ya dalam pengamatan ataupun pengetahuan kita bahwa kalau dalam bicara KLHK adalah berarti bicara di masih luas areal hutan dan lahan atau di areal peruntukan lain begitu. Tetapi, karena di sini juga salah satu daerah-daerah yang kita khawatirkan dengan adanya perubahan iklim seperti ini, maka bagaimana sih apa namanya dana yang besar ini juga untuk menjaga keberlangsungan dan terjaganya mangrove. Khusus daerah-daerah pesisir di Maluku Ibu Menteri, ada beberapa yang juga sudah beberapa daerah dan kawasan yang mati mangrove-nya, *nah* ini juga mungkin perlu ada satu kajian yang lebih luas juga dari KLHK.

Nah, terkait mangrove ini, saya juga menyoroti soal pada saat kunjungan kami Komisi IV bersama-sama juga dengan LHK ke Batam gitu untuk Kunspek. *Nah*, saya ingin mendapatkan penjelasan nih, sejauh mana proses yang dilakukan terhadap penyidikan pemanfaatan hasil hutan kayu di pada saat kunjungan kami itu, karena produk arang kayu mangrove yang tadi disinggung oleh Ibu Aeni tadi bahwa menurut pengamatan kami itu tidak sesuai dengan prosedur dan itu sudah berlangsung mungkin puluhan tahun gitu dalam apa namanya satu tujuan ekspor lagi ya, dalam jumlah yang banyak khawatirnya jika ini di apa namanya berlangsung terus-menerus, bagaimana dengan kondisi mangrove kita.

Terakhir Ibu Ketua, soal aspirasi Dapil. Saya minta ada sarana prasarana untuk mobil sampah di Kota Ambon dan DAK kalau bisa di tahun ini juga untuk Maluku diadakan Bu Menteri, karena di tahun sebelumnya itu hanya 1 dari 13 kabupaten kota. Dan juga saya pernah menyampaikan mungkin ada alat transportasi laut yang khusus untuk sampah-sampah di pesisir Bu Menteri, sampah plastik sangat-sangat mengkhawatirkan biota kita yang ada di laut perlu mungkin juga ada tidak tahu apakah pencinta sampah di laut ini juga dimasukkan di dalam salah satu ininya KLHK.

Terima kasih, Bu Menteri.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

WAKIL KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M. /WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Wa'alaikumsalam,

Terima kasih, Bu Saadiah.

Ibu Alien.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Terima kasih, Ketua.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Selamat siang,
Salam sejahtera untuk kita semua,

Tentunya yang saya hormati Pimpinan saya yang paling cantik selalu bertahan dan teruji sudah menjadi Doktor, dan diuji oleh Bu Menteri, selamat.

Tentunya yang saya hormati juga Bapak-Ibu Komisi IV, Bu Menteri, Bapak Sekjen beserta jajaran Eselon I, di sini juga ada Direktur Perhutani, terus beberapa undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu,

Ramadan Karim, Ramadan Mubarak, semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi yang menjalankannya. Aamiin, aamiin, ya rabbal'alamin.

Bu Menteri, saya langsung saja. Karena tadi Mas Ravindra sudah sedikit menyinggung soal Freeport dan *tailing* yang ada di Papua. Mohon maaf, Bu Ketua, kami sangat menyayangkan karena laporan yang disampaikan oleh KLHK kepada Komisi IV seolah-olah ini adalah laporan perusahaan yang di *copy-paste* mungkin tanpa melihat situasi dan keadaan yang sebenarnya. Kami setiap minggu mendapatkan laporan langsung, Bu Menteri, dari masyarakat dan beberapa tokoh masyarakat yang ada di sekitar Sungai Ajkwa, terus juga dimana tempat pembuangan *tailing* yang sebenarnya. Jadi mohon sangat agar memang kalau memang harus turun di lapangan, Bu Ketua, memang betul, tapi ini Papua perjalanannya juga luar biasa ini bulan suci Ramadan, tapi kalau memang ini sebagai amal ibadah jariyah kita pergi, oh nanti. Oh ya, oke setelah lebaran saya setuju lah, tapi kalau. Ya, tapi kalau bulan suci Ramadan, aduh, oke.

Karena ini sangat berpengaruh sekali, Bu Menteri, kami sudah menerima rapat langsung seperti yang kita sudah sampaikan. Memang ini, mohon maaf *nih*. Ini kan bukan cuman rapat bersama dengan KLHK dan juga bersama tokoh masyarakat, tapi kami waktu itu telah mengundang PT Freeport dan melaporkan hal yang tidak sesuai, untung puasa bulan ini Bu Menteri, kalau *nggak* saya sudah emosi juga nanti mengurangi puasa saya *nih* karena tidak sesuai, Bu Menteri. Mohon maaf, yang dilaporkan oleh Direktur PT Freeport eh Dirut PT Freeport itu sungguh sangat menyenangkan hati dan telinga kita. Tapi setelah itu, Komisi IV melalui arahan Pimpinan dan Ketua Komisi kami menerima kunjungan dari Provinsi Papua, gabungan dari Anggota DPR dan juga ada pemerhati lingkungan melaporkan hal yang tidak sesuai dengan apa yang dilaporkan. Dan ini mohon maaf, Bu Menteri, kami baca laporannya Bu Menteri, kalau memang perlu saya akan kirimkan berita-berita yang sudah mereka rilis dan setiap hari mereka sampaikan ke kita. Tadi yang di disangkakan Ketua, saya sangat menyetujui dan juga Pak Sulaeman, ini yang Freeport.

Kemudian, Bu Menteri dalam beberapa rapat lalu, kami telah juga menyampaikan tentang masalah akibat limbah atau akibat kerusakan lingkungan oleh PT Antam. Mohon maaf, sampai saat ini pun kami belum mendapatkan *action* langsung dan *report* langsung dari KLHK, karena memang kami mengajukan undangan tapi tidak diizinkan oleh Pimpinan Komisi VI, kalau *nggak* salah seperti itu ya Ketua? sehingga kita tidak bisa mengklarifikasi langsung. Tapi dampak yang dilakukan oleh PT Antam, lingkungan yang ada di Sulawesi Tenggara sana itu adalah PR siapa dan tanggung jawab siapa? Apakah ini harus terus kita tanyakan, harus terus kita kritisi untuk bisa mendapatkan *action* atau apakah kita harus setiap Kunker-Kunspek turun ke sana Bu Ketua? Apa Ibu Ketua mau turun lagi seperti bulan suci Ramadan tahun lalu? Iya, mungkin kita bisa turun lagi ya. Karena ini sangat disayangkan Bu Menteri, kan kami juga kemarin waktu reses saya udah lihat laporan hasil reses kami waktu di Sulawesi Tenggara dan mendapatkan apa namanya tanggapan dari KLHK walaupun tidak semuanya mungkin saya akan berikan lagi *report*-nya biar mungkin KLHK bisa lebih spesifik lagi karena waktu kemarin kita panggil ada beberapa perusahaan katanya menunggu hasil dari SK oleh Kementerian KLHK untuk mendapatkan izin kalau bukan kalau *nggak* salah begitu ya Pak, Pak Roy ya? karena ada beberapa perusahaan ternyata di udah beroperasi, mereka menunggu, ternyata izinnya itu izin orang lain, bukan izin mereka. Jadi intinya mereka beroperasi bukan atas nama izin, berarti ini tumpang tindih apa tindih tumpang saya juga *nggak* tahu, jadi inilah yang menjadi permasalahan. Jadi mohon dengan sangat kalau memang mau menyangga atau memberikan informasi klarifikasi terhadap Komisi IV yang sesuai dengan pertanyaan kita dan juga benar-benar sesuai dengan izin-izin yang dikeluarkan oleh KLHK.

Kemudian, Bu Menteri. Tadi sudah disinggung oleh bagaimana kita harus melihat bahwa kuota, ya ini saya juga lihat ada pembahasan tentang kuota dan setiap kali rapat kalau *nggak* salah saya selalu membahas soal kuota ya, Bu Menteri, ya. Ya, kenapa kita harus melihat seperti itu? kuota ini memang sangat memberi jaminan untuk mendapatkan investasi, tapi kalau seandainya perusahaan tertentu mendapatkan izin yang luar biasa besarnya tapi tidak dapat mengoperasikan wilayah tersebut dalam jangka 1 tahun hanya 1.000 misalkan satu perusahaan dapatnya 13 sampai 15.000, bagaimana dengan capaian-pencapaian PNBPN yang diharapkan oleh KLHK? ini sangat disayangkan juga *nih*, Bu Menteri. Tapi saya, saya tidak akan capek, saya akan terus sampaikan ini terus, terus, dan terus dan saya harap ini menjadi atensi Bu Menteri, karena bukan cuman kami saja yang menyampaikan itu, dari Komisi lain pun kemarin kita berbicara mereka juga menyinggung soal hal tersebut.

Kemudian kami, *Alhamdulillah* kemarin minggu kemarin kita mengadakan FGD bersama dengan Perhutani. Yang menjadi pertanyaan saya waktu itu, katanya nanti akan dijawab di Raker bersama dengan Kementerian KLHK. Saya menanyakan bahwa kalau *nggak* salah pada penyampaian, penyampaian hari itu, Perhutani masih memiliki luas wilayah yang... kan kita permasalahan 1,4 juta hektar kalau *nggak* salah ya yang dialihkan ke Perhutsos, bukan begitu Pak? 1,1 ya 1,1. 1,1, izinnya masih ada di Perhutani, tapi *action* di lapangan sudah masuk dalam izin yang dikeluarkan SK yang

dikeluarkan oleh Hutsos atau KLHK. Terus kalau seandainya terjadi sesuatu yang disampaikan Pak Slamet tadi misalkan pohon kayu putih sudah ditebang, ditanam dengan jagung misalkan atau tanaman-tanaman lainnya, kalau seandainya terjadi longsor, terjadi musibah di areal tersebut, siapa yang dikenakan sanksi dan siapa yang bisa kita tanyakan apa penyebabnya walaupun memang ada cuaca yang bisa menyebabkan itu, tapi kan di situ juga ada tanggung jawab kita terhadap satu lahan. Ini yang, yang saya pertanyakan waktu itu ya dan mudah-mudahan ini juga bisa dijawab.

Kemudian kalau seandainya kita melihat bahwa KLHK mendapatkan potongan atau bukan potongan sih, *automatic adjustment* kan bukan potongan tapi dibintangi. Dalam hal tersebut, dibintangi berarti belum dapat digunakan, belum dapat digunakan sementara bulan 1 sampai bulan 5 dan kita juga memprediksikan apa nih tahun ini El Nino La, La Nina ya Kak eh ya Ketua, La Nina, eh El Nino, El Nino. El Nino itu bagaimana dan saya sangat menyangkan pemerintah dalam hal ini c.q Kementerian Keuangan, KLHK ini *touchdown*-nya ini loh langsung loh ke masyarakat dan bukan cuman masyarakat, langsung ke hutan dan hutan itu adalah sumber kehidupan kita. Dan ini diberikan *automatic adjustment*, pembintangan-pembintangan yang saya sampaikan kemarin *Bintang Kejora*, apa emang harus kita ini apa namanya melihat *urgency* sesuatu, baru kita memberikan atensi yang luar biasa. Padahal sesuatu yang terjadi di lingkungan kita, bisa saja karena kita mengabaikan hal-hal yang sepele.

Kemudian Pak Roy, Pak Gakkum, saya sangat apresiasi sekali. Tapi, kemarin Bu Menteri pada rapat kerja dan juga RDP dan juga ini sama Raker juga, kami ingin mengetahui beberapa perusahaan yang seperti kita sampaikan ada yang melakukan pelanggaran, yang sanksi administrasinya apa, yang perusahaan apa, yang sanksi yang sudah diberikan misalkan ada pidana masuk ke ini kita mau lihat progresnya. Sehingga kalau kita turun ke lapangan nanti, apa yang menjadi temuan kita di masyarakat, apa yang menjadi temuan kita di tentang KLHK ini kita udah bisa menyampaikan sesuai dengan hasil progres yang dilakukan oleh KLHK.

Kemudian Pak Ketua, kan kita, Ibu Ketua, kita memiliki Panja Pelepasan Kawasan Hutan ya kalau *nggak* salah itu belum selesai, ini kita juga harus meminta *report-report* dari *sampling-sampling* yang sudah kita masukkan ke rapat, rapat kerja dan juga menjadi kesimpulan. Termasuk kalau di Panja kita tuh ada di Kalimantan Timur, Kalteng, Kalsel, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan juga masuk Maluku, Maluku Utara, dan Papua keseluruhannya. Kami minta juga itu data pelepasan kalau *nggak* salah Pak Ruandha, saya mengingatkan kembali bahwa kita sudah perlu meminta itu sehingga kita bisa dapat lah. Kemarin Bu Menteri sudah menyampaikan, tapi kan baru 30 atau 40% dari pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan sawit, terus juga pelepasan kawasan hutan untuk pertambangan batubara, dan pertambangan-pertambangan yang lain.

Dan untuk limbah, Bu Vivien. Saya harap dengan sangat *sampling* kita masih ada di Freeport dan juga PT Antam yang kita sampaikan, tolong ini menjadi antusias Ibu Vivien untuk bisa memberikan, inilah hasil yang baik.

Karena setahu saya di lapangan mereka bilang, walaupun KLHK turun tapi tidak sampai di lapangan, hanya di titik-titik tertentu dan panggil orang ketemu di ruangan-ruangan tertentu bukan di lapangan. Jadi itu yang saya, saya terima.

Terima kasih Ketua. Sudah.

WAKIL KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M. /WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Sudah rupanya.
Ibu Teti.

F-PG (TETI ROHATININGSIH, S.Sos.):

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Ketua, Ibu Ketua, segenap Anggota Komisi IV yang saya hormati,
Bu Menteri beserta jajaran yang saya hormati,

Selamat menjalankan ibadah puasa, semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. *Aamiin, aamiin ya Robbal'alamiin.*

Tadi sudah banyak disampaikan oleh Anggota yang lain terkait dengan Raker hari ini. Ini ada aspirasi Bu, mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini Ibu Menkeu membuka bintang-bintang yang tadi sudah disampaikan Ibu Alien dibuka sehingga kegiatan atau program yang (*suara tidak jelas*) bisa berjalan dengan sempurna. Ini ada aspirasi dari wilayah kita terutama, Bu, dalam rangka menghidupkan atau kehidupan masyarakat desa hutan, mungkin melalui pendidikan gratis bagi anak-anak yang yatim, fakir miskin, dan keluarga buruh, petani hutan atau penyadap getah, ada prioritas barangkali untuk pendidikan gratis sampai Sarjana Bu, ini permintaan dari masyarakat bawah sampai kuliah paling tidak, tidak seperti orang tuanya. Kedua, mungkin ada lagi kegiatan-kegiatan program peningkatan pendapatan keluarga mungkin dengan usaha tani, (*suara tidak jelas*) dan lain-lain mungkin kedepannya seperti ini... ini... ini aspirasi dari masyarakat, Ibu.

Dan yang selanjutnya Ibu, barangkali nanti bintangnya sudah dibuka di AA ini, program yang di Cilacap atau sudah Ibu Menteri survei ke sana mudah-mudahan nanti segera ditindaklanjuti.

Demikian, Ibu.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

WAKIL KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M. /WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Wa'alaikumsalam,

Pak Alimin, terakhir. Iya, tadi sebenarnya sudah saya panggil, tapi Mas *nggak* ada. Silakan.

F-PAN (Ir. ALIMIN ABDULLAH):

Terima kasih, Bu Ketua.

Pak Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi IV yang saya hormati,
Bu Menteri beserta seluruh jajarannya yang hadir hari ini,

Sebetulnya yang membicarakan *automatic adjustment*, Ibu, ya saya merasa serba bingung, karena sebetulnya ini tanpa ini pun kita masih mengatakan kurang sebetulnya anggaran buat LHK ini yang begitu luas dan begitu besar masalah masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya. Begitu banyak kerusakan, begitu banyak yang akan merugikan negara kita kalau departemen ini tidak cukup kuat untuk melindunginya. Ini hal-hal yang paling sederhana seperti yang kami juga saya baru ikut itu Bu, bertahun-tahun hutan bakau dibuat jadi arang kita seperti *nggak* ada petugas di situ. Padahal itu di dunia yang terang benderang gitu bahkan di pinggir jalan, jadi artinya kemampuan tenaga kita di bawah kurang dan itu pasti menyangkut masalah biaya. Dalam keadaan yang seperti itu, banyak juga fauna flora kita yang bisa akan punah tanpa bisa kita lindungi. Taman-taman nasional kita juga kurang terpelihara, jadi anggaran ini sebetulnya masih sangat kurang. Dan saya yakin ketika diajukan APBN itu dari pihak Ibu dan stafnya sudah mengajukan hal untuk menghadapi itu dan dengan kondisi negara seperti inilah sudah minimal atau yang bisa diajukan. *Nah*, nyatanya tanpa dicoba, tanpa ada sesuatu yang bisa saya terima, saya bisa mengerti.

Maksud saya begini Bu, kalau ketika kita melakukan *adjustment* atau *refocusing* waktu apa ada Covid, memang kita tidak bisa meramalkan ada Covid, tapi ini apa yang terjadi? sama-sama DPR dan pemerintah menyusun APBN tentu dengan serius ini, sesuai dengan kebutuhan negara kita, dengan kondisi keuangan kita, kita ajukan, disetujui semua mengakui setuju. Belum ada perubahan apa-apa dan kejadian ini luar biasa seperti Covid tidak ada, tiba-tiba semuanya dirubah dan termasuk yang departemen-departemen atau kementerian-kementerian yang saya anggap perlu ditambah justru kena juga, jadi seperti otomatis saja.

Sejujurnya, kalau menurut pendapat saya kalau negara kita ini betul-betul demokrasi, ini APBN ini undang-undang, yang membuatnya jelas DPR dan pemerintah, jadi ya kalau mau merubahnya sesuai dengan titik koma merubahnya aja harus ada persetujuan dari bidang yang membuatnya. *Nah*, ini anggaran yang dirubah, luar biasa, karena itu akan menyangkut program-program yang akan tertunda dan atau terbengkalai. Jadi sebetulnya yang pertama sebetulnya kalau di dalam waktu dengan KKP saya termasuk

mengusulkan agar ini ditunda ini *automatic adjustment*, karena tidak ada dasar hukum juga *nggak* jelas dan alasannya lain juga *nggak* tahu. Sebab kalau kita tahu alasannya, mungkin kita persoalkan apa yang menjadi benar alasannya atau tidak kenapa terjadinya *automatic adjustment*. Sebab kalau tidak, negara ini kan sepertinya main-main bikin APBN ini, padahal yang bekerja udah luar biasa menyusunnya. Berapa banyak orang yang terlibat nyusun, para ahli semua, jago-jago ekonomi semua, masa dalam waktu singkat sudah bisa berubah otomatis begitu banyak.

Menurut saya, negara kita memang agak, agak lemah di dalam penyusunan APBN, sehingga selalu terus menerus setiap tahun ada APBNP. *Nah*, sekarang bukan lagi APBNP malah ada *automatic adjustment* yang membuat *automatic* itu satu orang, Menteri Keuangan, dan kita tinggal setuju saja. Jadi saya khawatir, Bu, apa yang sudah pernah direncanakan ini sudah akan tertunda, padahal sebetulnya masih banyak hal lain yang belum, belum direncanakan atau belum diusulkan. Misalnya, saya pertama kali masuk di sini artinya ada ulang tahun jagawana itu yang ke berapa, itu sampai sekarang juga nasib mereka belum pernah kita perjuangkan dan itu tugasnya luar biasa untuk mengamankan kebakaran hutan misalnya. *Nah*, hal-hal seperti ini susah ya mengusulkan apa-apa yang menjadi permintaan rakyat.

Hal yang sederhana saja yang pernah saya usulkan ke Lampung, ini rakyat paling tidak menilai lemah kita, kita menjanjikan mau mendatangi persoalan mereka, sampai sekarang belum. *Nah*, persoalan pertama yang difikirkan oleh rakyat antara lain juga memang kita tidak mampu menyelesaikan masalah mereka, mungkin karena dananya. Karena masalah gajah ini saya udah bilang nih bukan hanya kebun mereka saja harus diamankan tapi gajahnya pun harus diselamatkan dan ini tidak, tidak mudah membuat ini harus punya program menanam tanaman yang dibutuhkan sama gajah, juga tanaman rakyat juga harus dirubah barangkali supaya tidak disukai gajah, macam-macam harus dibuat, itu perlu dana. *Nah*, dan sekarang sampai hari ini kalau saya ditanya rakyat, kenapa yang sudah janji datang juga *nggak* ada? Ya, saya bilang ya Pak Menterinya, Bu Menterinya belum mengizinkan Sekjenya ke sana sebabnya *nggak* ada uang atau apa saya *nggak* ngerti.

Nah, jadi menurut saya hal ini Bu kalau kita mau jujur, mestinya ini kita tolak ini *automatic adjustment*, kalau kita mau menyelamatkan negara kita ini dan kalau betul kita dulu menyusun programnya dengan benar, sudah maksimal. Jadi tidak bisa seorang menteri bisa gegabah saja memberikan persetujuan dulu pada saat menyusun, kemudian di tengah jalan dia rubah seperti ini. Jadi menurut saya, kalau kita akan terus seperti ini akan lebih hebat lagi. Mungkin di tengah jalan lagi, belum lagi berjalan yang di *adjust* sekarang ini, di *adjust* lagi sehingga kita tidak punya pegangan. Kalau ada yang kita sudah janjikan sama rakyat berdasarkan APBN yang sudah disetujui dan belum lagi berjalan sudah kita coret, ini luar biasa. Makanya masih kita senang karena hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan rakyat katanya tidak dilakukan *adjustment*, itu kupingnya saja *nggak* dengar, tapi kalau berubah lagi suatu saat nanti dirubah lagi itu juga kena juga *nggak* bisa apa-apa.

Sama dengan rakyat sekarang mengatakan soal pupuk, apa salahnya ketela segala macam itu tidak mendapat pupuk? masih tanaman manusia, buat makanan manusia, dari dulu juga sudah ada sekarang bisa berubah. *Nah*, kan tadi kami menjawab karena kelemahan negara kita memproduksi pupuk yang terbatas, kan berarti negara yang kurang, perlu anggaran barangkali untuk memproduksi pupuknya. Jadi bukan mau rubah anggaran, mau merubah peraturan, yang tadinya sudah biasa dapat pupuk, sekarang *nggak* dapat pupuk. *Nah*, buat kami, Anggota DPR tinggal dipertanyakan saja sama rakyat, apa yang di buat kalian di sana? yang kami sudah dapat bukannya tambah baik malah jadi hilang. *Nah*, ini kan sesuatu yang juga sama dengan anggaran ini Bu Menteri, mungkin Bu Menteri untuk ketemu rakyat ditanya agak lama, tapi kalau kami pulang langsung. Kalau mereka tahu ada yang dulunya sudah dianggarkan untuk dibantu untuk di perbaiki, di *cut* karena ada *automatic adjustment* yang ditanya itu kami. Jadi sebetulnya melalui Ibu Menteri sepertinya perlu dipertimbangkanlah, disampaikan sama Menteri Keuangan supaya jangan terlalu, terlalu enteng lah merubah APBN yang sudah kita buat bersama dan sudah di agunan, sudah diketahui oleh rakyat karena sudah disahkan, sudah disebar, *nah* ini yang saya ingin.

Nah, selain dari itu Bu saya minta yang terakhir ini. Saya minta Ibu punya perhatian lah sama 27 kampung itu yang sudah, bahkan mereka sudah mengajukan surat mau datang kemari, tapi saya setuju saran Ketua ngabisin biaya saja dan rakyat juga bisa terima. Tapi kalau kita diam saja terus, apa maksudnya kita menahan mereka kemari, dia punya hak. Jadi menurut saya, ini juga perlu diperhatikan.

Yang kedua, Bu, ini ada juga, bukan saya tidak tahu persis. Tapi ada 4 desa di pesisir barat itu yang katanya sudah berapa tahun-tahun ini menunggu persetujuan izin dia membuka akses jalan, karena ada berapa ribu dari 4 kampung itu. Saya *nggak* tahu itu ada wewenang daripada kementerian, tapi menurut saya keputusannya harus jelas. Kalau memang pasti kita tidak terima berikan, jadi jangan sampai terus-terusan mengajukan usul termasuk juga disampaikan melalui kami, padahal kami *nggak* bisa juga mutusin. *Nah*, menurut saya kalau Ibu bisa datang ke sana, meninjau betul *nggak* rakyat itu ada, betul *nggak* jalan tuh dibutuhkan dan bagaimana jalan keluarnya? Saya kira negara mesti punya jalan keluarnya. Saya tidak tahu persis karena saya belum pernah ke sana dan bukan Dapil saya juga ini Dapilnya Pak Sudin sebenarnya. Iya, iya iya, iya iya. Jadi saya terus terang belum pernah juga ke sana Bu ya, jadi melihatnya belum tapi menurut informasi rakyat sangat membutuhkan akses jalan. Di Way Haru, apa?

KETUA RAPAT:

Gini gini gini, saya jelaskan.

Ini surat usulan itu dibawa oleh seseorang barusan, intinya ingin membuka jalan yang lebar di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Itu ada di Way Haru, ada Way Heni ya, nah itu. Itu kan sudah ada Jalan Patroli 3 meter, bukan *nggak* ada jalan, jalannya sudah ada. *Nah*, kalau itu di lebarin menjadi

jalan raya, kira-kira nanti hutannya yang sekelilingnya habis dibabat *nggak?* yang 3 meter itu ada jalannya bukannya *nggak* ada.

F-PAN (Ir. ALIMIN ABDULLAH):

Nah, itu saya belum tahu.

KETUA RAPAT:

Nah, makanya saya kasih tahu. Kalau Bapak *nggak* tahu, saya kasih tahu Pak.

F-PAN (Ir. ALIMIN ABDULLAH):

Iya betul Pak, biar rakyat ini juga.

KETUA RAPAT:

Itu aja. Terima kasih.

F-PAN (Ir. ALIMIN ABDULLAH):

Terima kasih Bu.

Jadi jelas, ada suatu permasalahan rakyat punya keinginan keputusan kita dan kalau kita berikan keputusan yang bisa dia terima, saya pikir selesai. Artinya mestinya disetujui saja 3 meter itu tidak diperluas, tapi juga dibolehkan, legal gitu. Saya *nggak* tahu yang 3 meter ini legal apa *nggak* juga *nggak* tahu, tapi sudah beres iya, artinya sudah izin kalau gitu.

KETUA RAPAT:

Kalau sama Pak Alimin legal lah udah, gampang. Bukan, yang 3 meter Jalan Patroli.

F-PAN (Ir. ALIMIN ABDULLAH):

Yang 3 meter katanya sudah ada itu saya *nggak* tahu.

KETUA RAPAT:

Pak Alimin bertanya yang 3 meter itu kan jalan patroli, legal *nggak?* legal, kalau Pak Alimin yang bilang kan. Saya juga bilang legal, tenang aja, Pak Alimin ada saya.

F-PAN (Ir. ALIMIN ABDULLAH):

Setuju kalau dia memang rakyat yang memerlukan, saya kira 3 meter itu cukup. Kalau menurut saya ini apa, Bu, kalau memang hanya untuk kebutuhan seperti yang katanya masyarakat adatnya yang minta, saya pikir 3 meter itu

cukup kalau membuat akses jalan. Cuma saya *nggak* tahu yang maksud mereka 3 meter pun ini jalan darurat atau memang bisa di apa dibuat jalan yang normal sehingga bisa dia menjadi lalu lintas dalam hal mereka kebutuhan angkut barang kebutuhannya atau menjual produksinya, itu yang saya *nggak* tahu, apa itu boleh di? *Nah*, berarti 3 meter cukup luas menurut saya. Jadi kalau kita beri keputusan begitu, rakyat juga tahu bahwa kita sudah memberikan akses yang cukup memenuhi.

MENTERI LHK (Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc):

Itu yang 3 meter di tanah di kawasan konservasi, itu kalau menurut ketentuannya, Pak. Saya kira Pak Darori lebih paham, itu hanya kepentingan patroli tapi kalau diminta oleh pihak luar itu kelihatannya. Nanti kita lihat, kalau.

F-PAN (Ir. ALIMIN ABDULLAH):

Iya, saya kira begitu, Bu, supaya ada keputusannya. Rakyat ini kan ingin kepastian, apakah bisa kita bantu apa tidak. Iya, terima kasih, Bu. Saya hanya menyampaikan, buat saya, saya berharap apa yang Ibu sampaikan ini bisa saya tunggu. Jangan nanti seperti Pak Sekjen, saya ditanya rakyat terus. Pak Sekjen ini bikin malu saya ini.

WAKIL KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M. /WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Pak Sekjen, ditunggu.

KETUA RAPAT:

Kayaknya dendam kesumat nih.

F-PAN (Ir. ALIMIN ABDULLAH):

Terima kasih, Ketua.

WAKIL KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M. /WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Baik. Terima kasih.

Pak Sekjen ditunggu, ditunggu Pak Alimin.

KETUA RAPAT:

Jadi gini, tadi kan banyak yang bicara masalah Mangrove nih ya. Apa kita adakan FGD untuk masalah mangrove ini?

F-P.... (.....):

Setuju.

KETUA RAPAT:

Ya. Yang kedua, permasalahannya ini Badan Restorasi Gambut ini tidak punya fungsi pengawasan, betul? fungsinya hanya bertanam tok, nanam dan evaluasi. Bukan yang sudah ada itu dijaga, tidak. Ya, jadi ya, Bu Menteri, setuju kita adakan FGD khusus untuk mangrove ini, termasuk juga apabila izin-izin yang ada masih itu dicabut aja semua supaya *clear and clean* tidak ada masalah lagi.

Silakan, tadi pertanyaan sudah cukup. Bu Ketua, mau nanya?

WAKIL KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M. /WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Nggak, saya mau nambahin aja.

KETUA RAPAT:

Iya.

WAKIL KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M. /WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Selain apa mangrove tadi juga banyak permasalahan tentang pemberdayaan masyarakat juga. Jadi, kayak misalnya yang tadi saya angkat aja, contoh yang saya angkat tentang PT Amman itu tadi. Bagaimana hutan, lalu kemudian atau perusahaan-perusahaan yang menggunakan lahan kita itu mempunyai manfaat yang besar terhadap rakyat, itu juga menurut saya penting untuk kita diskusikan lebih detail lagi, itu juga bisa di FGD kan kalau menurut saya. Itu ya, Bu Menteri ya.

Dan yang lain sih, kalau AA itu kalau bahasanya Pak Pak Slamet mana? Pak Slamet tadi bahasanya *given*, kok *given* itu takdir, bahasa Jawanya takdir bukan kalau *given* itu. Jadi kita *nggak* bisa ngapa-ngapain, meskipun memang kita *nggak* setuju saya yang saya katakan tadi ya siapapun bisa melakukan pemotongan-pemotongan anggaran, tapi apa boleh buat memang itu sudah jadi keputusan. Itu saja sih.

Saya pikir itu. Bapak-Ibu sekalian, Bu Menteri. Semua masukan dan respon dari para Anggota silakan Bu Menteri, dan nanti Pak Dirut juga ya untuk merespon beberapa pertanyaan.

Monggo, Bu Menteri.

MENTERI LHK (Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc):

Terima kasih.

Yang terhormat Pimpinan Komisi IV DPR RI,
Yang kami hormati Ibu dan Bapak Anggota Komisi IV DPR RI.

Pertama, kami, saya telah mencatat keseluruhannya di dalam catatan saya ada 24 halaman dan saya ingin memperkuat justifikasi bahwa kalau kita lihat diskusi kita tentang mangrove tadi sangat banyak yang terhormat Anggota juga mengangkat, Pimpinan. Dan kalau kita lihat hal-hal yang terungkap itu sudah sangat cukup mendasar, menyangkut konseptualnya, menyangkut legal aspeknya, dan menyangkut *law enforcement* pengawasan, jadi bukan hanya sekedar rehab, tanam. Tadi yang minta pemeliharaan Bu Eni kalau *nggak* salah, itu juga sebuah konseptualisasi. Oleh karena itu, kami sangat mendukung untuk kita melakukan FGD untuk mangrove, nanti kita akan tajamkan dengan segala aspek.

WAKIL KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M. /WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Mohon maaf, saya tanya.

Dalam Perpresnya memang tidak ada kewajiban untuk *me-monitoring* hasil tanaman kita itu? iya, dari BRGM, *nggak* ada? tugasnya itu.

MENTERI LHK (Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc):

Sampai tahun ke 0, T0, T1, T2.

WAKIL KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M. /WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

0, T1, T2 itu *nggak* ada? Ada?

MENTERI LHK (Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc):

3 tahun, 3 tahun saja.

WAKIL KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M. /WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

3 tahun saja. Oh, setelah itu tidak ada?

MENTERI LHK (Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc):

Setelah itu *nggak* ada. Yang lebih konseptual lagi karena ini ada yang hutan, ada yang bukan hutan, lebih konseptual lagi kalau karena itu tambaknya rakyat, terus kita mau bagaimana. Tadi ada yang menyampaikan yang terhormat Anggota bahwa dari 600.000 kan yang layak cuma 193.000, itu pengertian layak itu kan dalam arti kriteria apa itu kelihatannya karena kriteria pada saat ini dia lagi dipakai tambak oleh rakyat, nah yang seperti itu secara konsep kita mau apa gitu. Oleh karena itu, saya kira pandangan dari yang terhormat Anggota dan Pimpinan dengan berbagai pengalaman masing-masing karena kan subjektivitas itu berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki itu menjadi akan sangat baik. Oleh karena itu, kami sangat mendukung untuk FGD mangrove.

Yang kedua, saya ingin juga menjustifikasi lebih kuat bahwa kita memang perlu secara mendasar kelihatannya bicara tentang pemberdayaan masyarakat karena dia bukan hanya soal PKBL (Pembinaan Kemasyarakatan dan Bina Lingkungan) dari suatu perusahaan, tadi kita ngomongin Hutsos juga pemberdayaan masyarakat, ngomongin rakyat yang ada di dalam kawasan konservasi juga pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, yang terhormat Pimpinan ini menjadi sangat baik kalau kita dalam secara lebih konseptual dan lebih komprehensif dan lebih tajam nanti arahnya ke mana, aspeknya apa. Karena pada dasarnya, dari catatan-catatan yang terhormat Anggota dan Pimpinan, saya berterima kasih karena kelihatannya *spirit*-nya itu kita sama, *spirit*-nya sama bahwa kita mau belain rakyat, tetapi dengan sudut persoalan yang berbeda-beda lalu itu maka jadi, jadi seperti jadi masalah dan tinggal lagi bagaimana secara teknis apa namanya pekerjaan-pekerjaan lapangan itu dilakukan oleh para petugas di eksekutif dalam hal ini KLHK. Itu tanggapan kami, jadi kami sangat mendukung untuk FGD pemberdayaan masyarakat. Mungkin kita lakukan habis lebaran ya, Ketua, ya.

Kemudian saya mencatat dan memperhatikan catatan-catatan tentang Freeport Indonesia dan Amman, Amman Mineral, Amman Mineral. Dan saya akan meneliti lanjut ini dan saya coba di dalam dulu apa namanya saya konsolidasikan lagi dan saya coba eksplorasi apa *sih* sebetulnya. Karena memang kalau kita bilang audit, itu sebenarnya perintah undang-undang, itu ada, ada syarat, ada konsekuensi, ada implikasi, maka saya mau *explore* dulu. Jadi saya, saya akan mendalami dulu tentang ini.

Kemudian tentang kebakaran...

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T):

Izin Pimpinan. Bu Menteri, izin. Bu Ketua. Iya.

Khusus untuk yang Amman Mineral ini Bu ya. Ibu sudah jelaskan prosesnya di sini sudah panjang, ada temuan ya dan ada kesimpulan Ibu bahwa belum bisa dikeluarkan suratnya karena terkendala alat. Saya *challenge*, Bu Menteri, berani atau bisa tidak kita buat semacam putusan sela Bu Menteri, tidak boleh dulu buang *tailing* ke laut sampai keluar surat pernyataan bahwa ada surat dari LHK gitu. Jadi jangan apa namanya suratnya terus lama-lama ini sejak tahun 2001 ada indikasi itu gitu dan secara model ini sudah kita lihat bahwa ada *tailing* yang keluar ke laut dari garis batas yang diizinkan. *Nah*, bisa *nggak* kita buat surat, hentikan dulu pembuatan *tailing* itu ya atau hentikan produksi yang mengakibatkan *tailing* itu kita buang ke laut ya, setelah jelas ada surat dari LHK, baru bisa dilanjutkan.

Demikian, Bu Ketua.

MENTERI LHK (Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc):

Yang disebut audit lingkungan itu kalau menurut undang-undang. Pertama, jelas ada pelanggaran undang-undang, melanggar aturan. Yang

kedua, dia terindikasi melawan hukum atau tidak taat, tidak akan mentaati undang-undang. Yang ketiga, sesuatu yang beresiko tinggi.

Nah, saya kelihatannya harus mendalami dulu dari segala aspek, Pak Johan yang terhormat, karena ini kan memang saya sampaikan dan catatannya masih sangat teknis saya akan *explore* dulu ke dimensi hukumnya, Bapak.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T):

Maaf sekali lagi, Ibu Pimpinan, ya.

Di halaman 33 itu Bu, di bahan yang Ibu kasih ini sudah jelas sekali di situ. Diketahui, hasil *sampling* kualitas sedimen di beberapa titik area DSTP itu *tailing* bawah laut ini terdapat parameter Hg melebihi baku mutu. Ini sudah jelas, Bu, hasilnya Ibu itu ya, ini sudah jelas terjadi ancaman lingkungan hidup. *Nah*, jangan biarkan mereka membuang *tailing* ini sampai kemudian kita benar-benar ya Ibu mengkaji ini dengan baik gitu, karena indikasinya sudah ada. Jangan sampai indikasinya ada, dengan alasan kita tidak ada peralatan mereka tetap memproduksi ya, rakyat lagi, Bu, yang menjadi apa yang menjadi korban dari ini. Sekali lagi, cukup Buyat saja menjadi bencana *tailing* ini.

Terima kasih.

MENTERI LHK (Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc):

Iya. Saya perhatikan Bapak dan saya akan segera panggil semua Dirjen dan elemen yang terkait tentang ini.

Kemudian terkait dengan...

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Bu Ketua.

Bu Menteri maaf, sebelum Ibu ke ini kan tadi sempat menyinggung soal Freeport, mungkin sekalian aja sama Amman juga dipanggil semua Dirjen. Tapi yang saya mau sampaikan bahwa yang disampaikan oleh KLHK ini adalah beberapa desa yang masuk dalam daerah binaan Freeport, yang masuk yang dilaporkan oleh KLHK. Tapi yang kita permasalahan selama ini adalah dampak dari pembuangan limbah *tailing* itu di beberapa, beberapa desa hampir 26 kalau *nggak* salah waktu itu. Itu Bu Menteri yang kami permasalahan, dampaknya di luar dari binaan, desa binaan Freeport itu bagaimana langkah konkritnya seperti apa, karena pendangkalan Bu Menteri, terus juga ada kegiatan penanaman mangrove di sana, di tempat peninggalan eh pendangkalan, dan sungai *Alhamdulillah* yang tadinya mengalir sudah tidak ada lagi sungai di situ.

Terima kasih.

MENTERI LHK (Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc):

Baik. Saya perhatikan Ibu Alien yang terhormat. Memang cerita sangat panjang kalau bicara tentang masalah lingkungan Freeport, sebab di masa yang lalu begitu lepasnya dan waktu kami coba mengikat juga tidak mudah persoalannya. Jadi saya akan cek lagi secara keseluruhan semuanya dari proses panjang yang telah dilalui dan cukup sulit itu.

Pimpinan, saya mohon izin ingin mempercepat aja.

Yang Karhutla, pada saat ini jumlah *hotspot* dari tanggal 1 Januari sampai dengan hari ini itu 139, dibandingin tahun lalu pada waktu yang sama tahun lalu tuh angkanya 409. Kita di Kementerian LHK sudah setiap bulan itu kita rapat dengan lintas kementerian dan lembaga pada level Eselon I untuk mengevaluasi potensi hujan kondisi panas dan *hotspot*. Kemudian rapat koordinasi yang dipimpin Menkopolhukam juga sudah, kami setiap bulan juga melapor kepada yang terhormat Bapak Presiden.

Untuk terakhir kemarin, kebakaran di Riau tanggal 24 kebakaran hampir satu hektar, 25, 26 saya kejar terus, akhirnya tanggal 26 malam udah mati. Itu yang termonitor terakhir. Koordinasi di daerah kelihatannya sudah sangat baik dan relatif cukup mantap, tetapi saya setuju dengan Ibu dan Bapak yang terhormat Anggota bahwa kita tetap harus sangat waspada mengingat prediksi bahwa El Nino akan muncul di pertengahan tahun dan ada kemungkinan kemarau juga bisa lebih awal.

Saya mohon izin melaporkan bahwa memang kita sudah punya *tech* pendekatan untuk pencegahan secara permanen yaitu dengan sistem *monitoring hotspot*, patroli, partisipasi masyarakat tadi saya berterima kasih yang terhormat Anggota menyebut MPA dan juga Polhutan lain-lain, Manggala Agni, dan sebagainya. Dan juga yang penting adalah membuat gambut selalu basah dengan teknik modifikasi cuaca. Saya mohon izin melaporkan, mulai tanggal 30 Maret selama 12 hari akan dilakukan TMC di Riau. Kemudian mulai 26 April selanjutnya di Riau, Jambi, Sumsel, Kalsel. Dan pada awal Mei kemudian di Riau, Kalbar, Kalteng, Kaltim. Jadi, sekali TMC itu kira-kira 12 hari.

Bagian esensial lain yang saya mohon izin untuk melaporkan, yaitu berkaitan dengan perhutanan sosial. Supaya tidak apa namanya, supaya bisa meyakinkan bahwa kami... saya menangani secara khusus sekarang tentang Grobogan, bukan hanya Grobogan, tetapi Grobogan, Blora, Rembang, Brebes, Kendal, Pati sebanyak 82 *eh* 84 kelompok dan ketemu saya langsung kelompoknya karena memang di situ sangat *complicated*, dan sangat ribet, dan berantemnya juga banyak. Jadi kami mencoba berkomunikasi dan coba mengurai yang seperti apa sesungguhnya bisa kita carikan jalan keluar, tapi prinsip bahwa tidak ada lagi sewa. Saya terima kasih yang terhormat Anggota Ibu dan Bapak serta Pimpinan punya semangat yang sangat baik soal Hutsos sama dengan pemerintah, tidak ada sewa-sewaan lagi, bukan lagi, tidak ada sewa-sewaan di kebijakan yang sekarang, jadi kalau ada itu mungkin yang lalu. Kemudian tidak ada sama sekali pungutan, jadi ini memang sudah dilaporkan.

Tentang Muara Gembong dan sebagainya, itu kebijakannya sudah ada dan sebagainya. Ini... ini yang nanti di FGD Pemberdayaan kita bisa keluarkan apabila ada catatan-catatan spesifik daerah. Jadi kalau pemerintah, saya jamin akan menjaga dan berhati-hati terhadap rakyat-rakyat yang di belakangnya adalah konglomerat, itu kita pasti kita *nggak* akan kasih.

Pimpinan, yang lain-lain saya catat dan nanti kami akan buat laporan tertulis. Tapi sebelumnya saya mohon izin, saya ingin menyampaikan bahwa ini tindak lanjut hasil Raker 18 Januari. Ini jawaban atas tanggapan pada Raker tanggal 18 Januari, ini RDP tanggal 6 Februari, dan ini kira-kira mudah-mudahan dokumen-dokumen ini juga sudah pernah dilihat oleh yang terhormat Ibu dan Bapak Anggota.

Pimpinan, itu yang kami laporkan. Tertulis kami akan persiapkan, kurang lebih mohon maaf dan terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Ini ada laporan dari Badan Restorasi Gambut ya, Kepulauan Kabupaten Lingga. Contohnya, ini contohnya *nih*. Koperasi Mangrove Lestari Lingga di Desa Kudung, memiliki usaha panglong arang dengan jumlah tungku pembakaran arang 6 unit dengan kapasitas masing-masing 4-6 ton kapasitas dengan asumsi $1 \text{ m}^3 = 1,1 \text{ ton}$, maka kebutuhan bahan bakunya per tahunnya sekitar 65 M^3 . Coba Pak Badan Restorasi Gambut, saya *nggak* paham *nih*, ngitungnya gimana coba. Kemudian juga karena dia berusaha ini karena ada surat Bupati izin IUIPHHK HTR Nomor 304/KPTS/VI/2012 tanggal 26 Juni 2012 dengan luasan hutan mangrove yang dikelola sebanyak 317 hektar. Kalau 317 hektar ya sampai sekarang *tuh* sudah 11 tahun, kalau *nggak* habis *tuh* *nggak* mungkin. Sekarang saya tanya lagi kepada ini, ini pemilihan misalnya di atas diameter 10 iya kan, berapa tahunkah, berapa tahunkah untuk mencapai 10 meter diameternya? coba dijawab.

KEPALA BRGM KLHK (Ir. HARTONO, M.Sc.):

Terima kasih, Bapak Pimpinan.

Laporan ini kami buat setelah kami diajak oleh Bapak Ketua untuk melakukan sidak di Taman Buru Rempang, setelah itu memang berdasarkan informasi dari pemilik panglong mereka menginformasikan bahwa bahan bakunya mereka dapatkan dari Pulau Lingga.

KETUA RAPAT:

Betul.

KEPALA BRGM KLHK (Ir. HARTONO, M.Sc.):

Oleh karena itu, kami seminggu kemudian mengirimkan tim untuk *ngecek*, apakah benar arang yang di olah di panglong-panglong di Taman Buru Rempang itu benar-benar berasal dari sana. Kami melihat, memang di ada beberapa koperasi, Bapak, di sana.

KETUA RAPAT:

Ada, ini, ini ada laporannya kok. Saya udah baca.

KEPALA BRGM KLHK (Ir. HARTONO, M.Sc.):

Ternyata yang kita asumsikan bahwa penebangan mangrove itu sudah berhenti ternyata masih berjalan di Lingga, dasarnya karena ada koperasi yang mendapatkan izin dari bupati.

KETUA RAPAT:

Saya paham.

KEPALA BRGM KLHK (Ir. HARTONO, M.Sc.):

Iya.

KETUA RAPAT:

Nah, terus?

KEPALA BRGM KLHK (Ir. HARTONO, M.Sc.):

Nah, dari situ kami yang *ngecek* itu saja, Pak, apakah benar penebangan yang mereka lakukan itu sesuai dengan volume arang yang mereka ekspor setiap bulan.

KETUA RAPAT:

Pendapat Anda, benar *nggak*?

KEPALA BRGM KLHK (Ir. HARTONO, M.Sc.):

Dari pengamatan, sepertinya banyak mangrove yang ditebang dari lokasi lain, bukan dari lokasi yang ada izinnya.

KETUA RAPAT:

Sekarang gini lho, kita ngomong jujur. Kalau 13, 312 hektar izinnya, dikelola disikat selama 11 tahun, mungkin 10 kali lipat dan Anda kan waktu itu mendengar langsung dari cukongnya mengatakan, 1 bulan kami *export* 10 berapa 1.000 ton arang. Kira-kira kalau 1.000 ton itu membutuhkan bahan baku

berapa? 1000 ton loh, sedangkan ini menurut laporan dia hanya 60, 65 sampai 98 M³. Coba, kalau satu bulan 1000 ton, satu pemilik loh 2 gudang, iya toh, yang waktu hujan-hujan kita tengok. Kira-kira kalau 11 gudang, itu berapa ton? anggaphlah 5.000 ton 1 bulan dengan 11 tadi gudang itu, membutuhkan berapa, berapa ribu kubik? Iya kan. Saya juga minta Dirjen Gakkum nanti dijawab yang 11 ini bahan bakunya dari mana, karena saya sudah, sudah suruh orang ngecek, Anda ngecek, saya pun ngecek. Kenapa? kalau perlu keputusan bupati ini dianulir aja dicabut aja, tidak ada lagi istilahnya ngambil dari hutan tanaman rakyat untuk dijadikan bahan baku arang, cabut aja semuanya.

Sekarang yang Badan Restorasi Gambut tanam aja ya, melalui kelompok, melalui pengawasan, saya *nggak* yakin 100%, paling top 70% yang hidup, yang lain mati. Coba nanti kalau ada waktu sama saya ke Lampung Selatan, lihat BPDAS Lampung membuatnya bagaimana. Mereka itu membuat satu kelompok besar itu bukan satu-satu, bukan dua-dua bukan, langsung satu kelompok. Misalnya, satu kelompok itu 100 pohon, mereka tinggal melindungi pakai pagar bambu karena lebih kokoh dan lebih terjamin, kalau hanya satu-satu disapu dengan ombak, ya *wassalam*.

Coba Dirjen Gakkum jelaskan masalah kemarin sampai di mana kasusnya yang 11 itu, beserta Taman Burunya.

DIRJEN GAKKUM KLHK (Dr. RASIO RIDHO SANI, M.Com, M.P.M.):

Mohon izin, Bu Menteri.

Yang terhormat Pimpinan, Pak Sudin dan juga Wakil Pimpinan, serta seluruh Anggota,

Perlu kami jelaskan Pak Sudin bahwa berdasarkan hasil Pulbaket kami (Pengumpulan Bahan Keterangan), kami sudah melakukan, Pak, kami melacak di mana saja. Saat ini dalam tahap pemeriksaan Pak, sudah 30, sudah 31 orang yang diperiksa, Pak, berkaitan dengan kegiatan ini. Termasuk yang dari koperasi tadi koperasi yang ini nama koperasinya adalah Mangrove Lestari Dwilingga juga kita lakukan pemeriksaan ya dengan Ketua koperasinya Abdul Muthalib, *eh sorry*, saya *nggak* bisa menyebutkan nama Pak ya ini ya, dengan Saudara AM kita lakukan pemeriksaan, Pak. Jadi ini sedang kita lakukan intensif, Pak, pemeriksaan berkaitan dengan kasus yang ada di Kepri ini, Pak, berkaitan mangrove-nya, jadi kami periksa itu terkait dengan korporasi karena ini menyangkut korporasi juga, ada koperasi dari pemilik izinnya karena ada beberapa koperasi, Pak, tidak hanya koperasi dari Lingga. Tapi juga ada juga pihak-pihak terkait yang kami lakukan pemeriksaan, serta juga anggota masyarakat karena juga ada masyarakat juga yang terlibat di dalam hal ini.

Terima kasih, Pak Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terus, kalau mereka menebang di luar lokasi yang katanya yang mereka tanam apa sanksinya?

DIRJEN GAKKUM KLHK (Dr. RASIO RIDHO SANI, M.Com, M.P.M.):

Ya, ini pidana, Pak.

KETUA RAPAT:

Oh, ya sudah nanti kita lihat pidananya bagaimana. Dan saya juga minta segera Menteri membuat surat kepada Bupati untuk men-*stop*, kalau saya lihat ini tidak logika, dengan 312 hektar, dia bisa menghasilkan 5.000 ton per bulan untuk *export* ya percuma Badan Restorasi Gambut dan Mangrove dibentuk menghabiskan dana uang pemerintah sekian ratus miliar, bahkan sampai triliunan ini. Jadi, Pak Kepala Badan Mangrove, jangan dibilang saya *nggak* monitor, kemarin waktu itu saya kirim Pak Sekjen apa, Pak ini, ada kegiatan di sana toh? ternyata itu pencucian karung kan, betul? Saya itu *nggak* mungkin saya *nggak* monitor, saya monitor. Saya dapat laporannya, videonya, foto-fotonya, ternyata mereka sedang mencuci karung yang aktivitasnya *stop nih*, karungnya dicuci, iya kan, saya bilang sama PSDKP, ya kamu periksa pencemaran lingkungan di laut, itu aja. Ternyata mereka bukan aktivitas menyusun atau membuat ke dalam karung, ada kan waktu itu Pak Sekjen ya? udah saya kirim kan waktu itu foto-fotonya kan. *Nah*, terus yang Taman Buru gimana?

DIRJEN GAKKUM KLHK (Dr. RASIO RIDHO SANI, M.Com, M.P.M.):

Terima kasih, Pak Sudin.

Taman Buru juga kami melaksanakan tindak lanjut dari RDP kita, kami sudah melakukan penyegalan, Pak, dari 12 lokasi.

KETUA RAPAT:

Iya.

DIRJEN GAKKUM KLHK (Dr. RASIO RIDHO SANI, M.Com, M.P.M.):

Ini terkait ada korporasi yang ada di sana, terkait dengan perkebunan dan juga peternakan. Sedangkan kami sudah mendalami langkah-langkah hukum yang kami lakukan, Pak, karena ini ada dua langkah hukum Bu karena ini terkait juga Undang-Undang Cipta Kerja karena kan di Taman Buru, Pak, dan mereka lakukan aktivitas sebelumnya atau kami lihat apakah ada indikasi pidana lainnya Pak Sudin, itu.

KETUA RAPAT:

Gini.

DIRJEN GAKKUM KLHK (Dr. RASIO RIDHO SANI, M.Com, M.P.M.):

Kami sudah lakukan.

KETUA RAPAT:

Itu kan sudah lama.

DIRJEN GAKKUM KLHK (Dr. RASIO RIDHO SANI, M.Com, M.P.M.):

Iya.

KETUA RAPAT:

Sebelum ada Undang-Undang Cipta Kerja itu sudah mereka lakukan.

DIRJEN GAKKUM KLHK (Dr. RASIO RIDHO SANI, M.Com, M.P.M.):

Iya.

KETUA RAPAT:

Dan mohon maaf tidak mungkin tidak ada tanda kutip kongkalikong dengan oknum, saya katakan oknum di bawah. Iya kan? masa sebegitu besar ada ini, ada ini, masa mereka *nggak* tahu. Kalau yang kecil dari kecil itu harusnya ditertibkan, kalau sudah besar kan susah nertibkannya. Saya minta nanti laporannya, waktu itu progresnya kalau *nggak* salah 40 hari apa 60 hari, saya minta nanti lapor secara progres. Dan saya juga minta Bu Menteri untuk segera membuat surat kepada Bupati Lingga, kalau perlu nanti kita ngecek lagi orang saya pun sudah ngecek ke sana, termasuk foto-fotonya juga masih ada di *file* saya ya. Yang penting masalah 11 ini harus *clear* dulu ini, kalau *nggak* mereka enak-enak saja. Sementara Badan Mangrove capek menanam, satu sisi lagi mereka menebang untuk membuat keuntungan pribadi mereka. Ya harganya cukup menggiurkan, yang standar aja mungkin 1.500, 2.000, kalau yang super mencapai 6.000 per kilo. Ini loh yang disayangkan, usaha boleh *nggak?* boleh, tapi jangan sampai merusak alam.

Itu saja. Ada lagi, Anggota?

F-PAN (H. MUHAMMAD SYAFRUDIN, S.T., M.M.):

Ada Ketua. Kiri, dikit, dikit aja.

KETUA RAPAT:

Mau *ngomong* lagi?

F-PAN (H. MUHAMMAD SYAFRUDIN, S.T., M.M.):

Iya, dikit aja.

KETUA RAPAT:

Iya.

F-PAN (H. MUHAMMAD SYAFRUDIN, S.T., M.M.):

Mohon maaf, Pak Ketua, ngomong.

Bu Menteri, dikit saya mau nanya. Boleh *nggak* Bu Menteri ke STM itu kan belum berjalan, boleh *nggak* kita melakukan edukasi? jadi dari pihak pemerintah *eh* Bapak-Bapak kan nanti akan ini, ini, ini, ini nih apa sih rencana gitu misalnya rencana pembuangan di mana ini, ini, ini, supaya diberikan masukan supaya mereka tidak salah gitu, karena ini kan besar. *Nah*, saya mau tanya, boleh *nggak* diberikan edukasi, saya kira wajar ya kita memerlukan karena Sumbawa Timur Mining ini Bu mohon maaf, dua kali bahkan tiga kali dari Amman atau Newmont besarnya. Jadi, sayang sekali, mumpung kita ada di sini bisa memberikan edukasi bersama untuk kepentingan bangsa.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ya, Silakan menjawab.

MENTERI LHK (Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc):

Terima kasih, Ketua yang terhormat.

Yang terhormat Pak Rudi,

Di KLHK itu ada tiga lapis pembinaan pengawasan, jadi kalau pemerintah itu kalau *ngomong* pengawasan biasanya maksudnya Binawas, pembinaan dan pengawasan. Di KLHK ada tiga lapis. Pertama, lapis Badan Standarisasi. Tadi yang terhormat Pak Johan mempersoalkan baku mutu Hg Pak ya, itu nanti saya harus *attach*-nya di Pak Ari, itu bagian dari soal dia melebihi standar. Bagian yang kedua adalah pembinaan teknis dan evaluasi manajemen pengawasan manajemen teknik itu oleh Dirjen. Dirjen yang bersangkutan dalam hal ini kalau laut Amman berarti Dirjen Pencemaran, PPKL. Yang bagian terakhir, *last resort*-nya adalah Dirjen Gakkum, kalau udah kacau, udah *nggak* beres udah langsung aja dihajar di Gakkum. Jadi, pada dasarnya bisa karena konsepnya pembinaan.

F-PAN (H. MUHAMMAD SYAFRUDIN, S.T., M.M.):

Yang STM Bu, bukan di Amman. Bukan di Amman. Sumbawa Timur Mining.

MENTERI LHK (Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc):

Iya.

F-PAN (H. MUHAMMAD SYAFRUDIN, S.T., M.M.):

Bisa Bu ya?

MENTERI LHK (Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc):

Pada dasarnya bisa, karena konsepnya pembinaan.

Terima kasih.

F-PAN (H. MUHAMMAD SYAFRUDIN, S.T., M.M.):

Artinya kalau bisa Bu Menteri berkenan disampaikan ke jajarannya untuk melakukan pengawasan ya.

KETUA RAPAT:

Jadi dari pertanyaan, masukan dan lain-lain. Kita akan mengambil atau membacakan kesimpulan rapat kerja hari ini. Dari Inhutani ada yang mau sampaikan?

DIREKTUR UTAMA PERUM PERHUTANI (WAHYU KUNCORO):

Izin, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Iya.

DIREKTUR UTAMA PERUM PERHUTANI (WAHYU KUNCORO):

Sebentar. Tadi ada beberapa hal terkait dengan Perhutani yang disampaikan oleh Pak Slamet, terkait dengan penebangan pohon-pohon besar, Pak, di wilayah yang sampai dengan saat ini Pak Slamet masih belum pasti.

Ini mungkin sementara Pak Slamet dari pengecekan tim kami bahwa lokasi tersebut ada di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dan kami akan meminta tim kami yang ada di KPH Bogor untuk bisa memastikan kembali, nanti kami akan sampaikan kepada Pak Slamet.

Kemudian yang kedua tadi, Bu Alien. Mohon izin Bu Menteri, minggu lalu kami diundang FGD oleh Komisi IV di mana salah satu yang ditanyakan adalah terkait dengan kebijakan kawasan hutan dengan pengelolaan khusus. Dan kami ketika memberikan jawaban bahwa Perhutani telah mendapatkan tembusan dari surat Ibu Menteri kepada Bapak Menteri BUMN yang di dalamnya menyampaikan beberapa kebijakan yang sudah lengkap. Tapi Ibu juga sampaikan 287 yang saat ini sedang dalam proses ada yang menggugat, pasangannya adalah SK-1013 terkait dengan penetapan wilayah Perum Perhutani ini dan dilengkapi juga ada SK-474. Jadi ini sudah sangat lengkap, dan kami menindaklanjuti dengan melakukan analisis terhadap implikasi dari kebijakan itu terkait dengan *sustainability* dari Perum Perhutani dan nampaknya sampai dengan saat ini tidak ada masalah di kami. Dan tadi Ibu menyampaikan akan dibahas di FGD, barangkali kalau diperkenankan nanti kami bisa ikut untuk FGD tersebut Bu Menteri.

Mungkin itu Pak Ketua.

Terima kasih.

F-PDIP (ONO SURONO, S.T.):

Pak Ketua. Sebelum membacakan kesimpulan, izin.

KETUA RAPAT:

Mau *ngomong*?

F-PDIP (ONO SURONO, S.T.):

Iya, *ngomong* Pak.

KETUA RAPAT:

Iya.

F-PDIP (ONO SURONO, S.T.):

Terima kasih Bu Menteri.

Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, terkait dengan KHDPK. Saya melihat sekarang ini ada indikasi dari kelompok-kelompok yang tadi salah satunya mengajukan gugatan, tentunya pemerintah ya jangan berpatokan kepada orang atau personal-personal yang saya lihat mohon maaf mereka orang yang memang mempunyai kewenangan di masanya, mempunyai jabatan di masanya, yang saat ini mereka tidak punya jabatan dan bicara hal-hal yang sangat normatif, sangat ideal terkait dengan kerusakan hutan. *Nah*, contohnya di Jawa Barat. Pada saat Perhutani di babat itu iya pohon-pohonnya di Indramayu, di Subang, di manapun pasca reformasi itu, Pak, 99, tahun 2000 tuh di babat semua tuh dan mereka adalah salah satunya yang duduk sebagai pejabat-pejabat di situ. Rusaknya Bandung, kawasan Dago, Ciumbuleuit ya, terus Cilengkrang-Bandung Utara, termasuk Ciwidey-Pangalengan, mereka yang saat itu menjabat sekarang bicara terkait dengan idealnya pengelolaan hutan KHDPK ini *nggak* benar apa segala macam. Namun, mohon dalam hal ini coba pemerintah dalam ini harus mempunyai sebuah kepastian bahwa KHDPK itu bukan cenderung merusak, ini rakyat harus punya kejelasan juga. Termasuk evaluasi terhadap Perhutanan Sosial, saya dalam hal ini tidak dalam kapasitas secara penuh misalnya dengan mata buta mendukung KHDPK, tidak. Perhutanan sosial pun yang kemarin juga harus kita evaluasi benar, karena yang *nggak* benar ini seperti di Grobogan kemarin dan di Jawa Barat juga ada beberapa. Tapi ini menjadi catatan kita, dan kita jangan terpengaruh terhadap gerakan-gerakan oknum-oknum yang memang mencari pekerjaan saat ini karena *nggak* ada pekerjaan yang lain.

Nah, yang kedua, ini terkait dengan sampah. Saya mungkin sebulan lalu ketemu dengan Ikatan Pemulung Indonesia di Bantar Gebang. Ternyata

pemulung di Indonesia itu jumlahnya 3,7 juta di seluruh Indonesia dan saat ini mereka menuntut ada perhatian pemerintah terkait dengan status pemulung sendiri terkait dengan profesi yang ingin diakui oleh pemerintah. Yang kedua, mereka ingin juga kepastian terkait dengan jaminan sosial. Mereka juga ingin dilibatkan dalam beberapa program pemerintah terkait dengan daur ulang yang melibatkan perusahaan dan yang lainnya. *Nah*, sehingga saya mohon izin, Bu Menteri, mohon disiapkan waktu. Saya ingin membawa mereka juga ketemu dengan Ibu Menteri beserta jajarannya untuk beraudiensi. Karena Pak Sudin, 3,7 juta itu mayoritas juga Indramayu, Pak, Dapil saya tuh pemulungnya banyak.

KETUA RAPAT:

Itu pemulung?

F-PDIP (ONO SURONO, S.T.):

Pemulung.

KETUA RAPAT:

Yang lainnya ada?

F-PDIP (ONO SURONO, S.T.):

Ada juga, itu, itu kenalannya Pak Sudin yang lainnya. Jadi tentunya, ini bukan hanya bicara Dapil saya, yang pemulung di Bekasi, di Jakarta, mayoritas juga Indramayu, Cirebon ya, Subang, tapi tentunya terkait dengan nasib mereka dan peran mereka juga yang terkait dengan bagaimana mengurangi sampah di Indonesia ini. Jadi, mohon Bu kalau misalnya ada waktu, habis lebaran sajalah, Bu Menteri ya, nanti kita atur waktu mohon izin. *Nah*, saya akan bawa dengan mereka karena saya sangat peduli terkait dengan nasib mereka dan ternyata mereka tidak mau juga dicap sebagai masyarakat miskin, tapi inginnya ya pekerja miskin katanya. Saya juga *nggak* tahu, mereka *nggak* mau dicap sebagai masyarakat miskin karena mereka penghasilannya di atas kemiskinan ekstrim, mereka *nggak* mau dicap sebagai miskin ekstrim, tapi hanya pekerja miskin yang perlu bantuan juga dari pemerintah.

Itu saja.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Memang, Pak Ono luar biasa. Datang langsung ngomong, kemudian nanti katanya kumpul dengan para pemulung yang *tiga koma* berapa juta? 3,7 juta mengajak Ibu Menteri. Maksudnya Pak Ono, kalau sebelum lebaran dia agak pusing memang, saya tahu, ya gitu kan. Kalau Pak Alimin udah janji tadi sama saya Pak Alimin ya, janji sama Sekjen nanti bulan Juni kita ke Lampung karena kalau habis lebaran juga nanti jalan padat ya, macet lagi.

Jadi, Bu Menteri dari masukan dan saran para Anggota tadi, permasalahan perhutanan sosial itu memang konflik. Niatnya Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi baik, tetapi ini kan pengawasannya, dampaknya tadi yang misalnya di Grobogan kayu utuh ditebangin, diganti pohon-pohon yang kecil. Tadi udah dijelaskan sama Pak Slamet, menurut Dirjennya bilang ini sudah lama ditanam, padahal masih ada *polybag*-nya masih, masih hangat, rakyat bilang baru seminggu lalu. Kemudian sebelumnya tadi juga sudah ditampilkan ada papan plang besar, pengusaha jagung, bibit jagung. Kemarin pun sama Wandu saya bilang waktu FGD, harusnya kamu Wandu *nih* saya bilang sama Dirjen Tanaman Pangan, Grobogan kamu prioritaskan 50.000 hektar tanam kedelai, gampang kok, kamu kasih bibit yang bagus, prioritaskan mereka dapat pupuk subsidi, pasti mereka mau. Tetapi mungkin pemikirannya Wandu itu terlalu pintar, maka *nggak* kepikir ke sana, entah itu Dirjen Tanaman Pangan *mungut* di mana saya juga *nggak* jelas itu.

Silakan Bu Ketua, bacakan kesimpulan rapat. Nanti saya balik lagi, karena saya ditunggu sebentar.

WAKIL KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M. /WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Mau buka puasa ya.

Baik.

Bapak Ibu, Bu Menteri, Pak Dirut dan semua jajarannya.

Kita bacakan draft kesimpulan rapat kita kali ini.

1. Komisi IV DPR RI menyetujui *automatic adjustment* anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023 sebesar Rp458.603.392.000,00 dengan komposisi per Eselon I sebagai berikut:
 - a. Sekretariat Jenderal yang semula sebesar Rp457.728.759.000,00 menjadi sebesar Rp441.216.313.000,00;
 - b. Inspektorat Jenderal yang semula sebesar Rp91.830.528.000,00 menjadi sebesar Rp84.567.871.000,00;
 - c. Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari yang semula sebesar Rp252.624.634.000,00 menjadi sebesar Rp243.908.282.000;
 - d. Direktorat Jenderal Pengendalian Air, Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan yang semula sebesar Rp1.364.201.647.000,00 menjadi sebesar Rp1.267.206.481.000,00;
 - e. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem yang semula sebesar Rp1.667.784.111.000,00 menjadi sebesar Rp1.386.930.825.000,00;
 - f. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang semula sebesar enam ratus dua puluh dua, mohon maaf Rp602.644.047.000,00 menjadi sebesar Rp465.803.579.000,00;

- g. Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan yang semula sebesar Rp299.522.348.000,00 menjadi sebesar Rp292.072.158.000,00;
- h. Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang semula sebesar Rp354.211.103.000,00 menjadi sebesar Rp332.513.737.000,00;
- i. Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim yang semula sebesar Rp290.083.360.000,00 menjadi sebesar Rp276.738.604.000,00;
- j. Direktorat Jenderal Pengolahan Sampah dan Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun yang semula sebesar Rp203.784.773.000,00 menjadi sebesar Rp186.599.167.000,00;
- k. Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang semula sebesar Rp393.075.629.000,00 menjadi sebesar Rp377.255.373.000,00;
- l. Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang semula sebesar Rp262.940.688.000,00 menjadi sebesar *dua ratus lima puluh tiga miliar enam*, mohon maaf, Rp253.026.116.000,00;
- m. Badan Perlindungan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang semula sebesar Rp296.154.950.000,00 menjadi Rp283.758.812.000,00; dan
- n. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove yang semula sebesar Rp376.198.381.000,00 menjadi sebesar Rp362.584.248.000,00.

Para Anggota?

Pak Sekjen sudah di, angkanya? Ibu?

MENTERI LHK (Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc):

Setuju, Ketua.

WAKIL KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M. /WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

**(KETUK PALU 1 KALI)
(RAPAT:SETUJU)**

- 2. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk tetap menjaga konsistensi komitmen agar *automatic adjustment* pagu anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak mengurangi alokasi anggaran dalam melaksanakan program-program berbasis masyarakat serta kegiatan bimbingan teknis dan sosialisasi dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat atas pentingnya menjaga kualitas hutan dan lingkungan hidup.

Para Anggota?

Bu Menteri?

**(KETUK PALU 1 KALI)
(RAPAT:SETUJU)**

3. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk segera mengambil langkah-langkah nyata atas kebijakan kemitraan konservasi mulai dari tingkat regulasi sampai dengan pelaksanaan di lapangan agar tidak terjadi stagnasi kebijakan kemitraan konservasi.

Para Anggota?
Bu Menteri?

**(KETUK PALU 1 KALI)
(RAPAT:SETUJU)**

4. Komisi IV DPR RI akan melaksanakan *Focus Group Discussion* dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove dalam waktu dekat dalam rangka membahas pengelolaan ekosistem mangrove di Indonesia.

Ada dua kan ya, tadi ya? dan pemberdayaan masyarakat. Atau di poin bawahnya? sama pemberdayaan masyarakat. Beda? Oh, satu-satu. Di poin yang berbeda aja? di nomor 5 berarti ya. Yang mangrove ini kan sama bersama dengan BRGM. *Nah*, yang pemberdayaan masyarakat KLHK *doang*, oke. Saya ulangi ya. Poin 4.

4. Komisi IV DPR RI akan melaksanakan *Focus Group Discussion* dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove dalam waktu dekat dalam rangka membahas pengelolaan ekosistem mangrove di Indonesia.

Para Anggota?
Bu Menteri? satu-satu berarti. Empat, empat kan belum diketok, empat.

**(KETUK PALU 1 KALI)
(RAPAT:SETUJU)**

Sekarang nomor 5.

5. Komisi IV DPR RI akan melaksanakan *Focus Group Discussion* dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam waktu dekat dalam rangka membahas program pemberdayaan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan dan lingkungan.

Lingkungannya mana yang terkait dengan lingkungan? itu aja? Oh, oke. Silakan.

MENTERI LHK (Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc):

Kata programnya dihapus saja, sebab ini *beyond*, program, jadi konsepsi, segala macam.

WAKIL KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M. /WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Baik.

Termasuk yang di atas nomor 4 juga ya, jadi. Sudah ya, membahas pengelolaan untuk setiap ekosistem itu lebih luas ya. Poin 5 para Anggota? masih lama bukanya kok sudah lemas-lemas sih. Poin 5, setuju?

**(KETUK PALU 1 KALI)
(RAPAT:SETUJU)**

Baik, udah ya? Baik.

Bapak-Ibu, para Anggota yang saya hormati,
Ibu Menteri, Pak Sekjen, Pak Hartono, Pak Dirut semuanya,

Terima kasih atas kerjasamanya yang luar biasa ini *nggak* sampai jam 4 sudah selesai, karena kemarin sampai jam 4. Mudah-mudahan perbincangan kita nanti bisa ada hasilnya, dan hal-hal yang tadi belum dijawab mohon untuk dijawab secara detail juga untuk kita dan tentunya untuk masyarakat, untuk rakyat yang sedang menunggu juga jawaban-jawaban dari kita semuanya.

Saya pikir itu Ibu Menteri, sebelum ditutup.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Ibu Ketua.

WAKIL KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M. /WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Iya, Bu Alien. Sebelum ditutup mau apa?

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Sedikit aja menyampaikan untuk mengingatkan kembali atensi buat Bu Menteri bahwa kita menunggu aksi lapangan untuk aktivitas pertambangan di Sulawesi Tenggara, baik dampak lingkungan dan juga pelepasan kawasan hutan. Terus tentang Freeport, Amman Mineral, dan juga Antam Bu Menteri, biar nanti jawabannya. Tadi *sih* saya harapkan masuk di kesimpulan, tapi sudah sering masuk kesimpulan. Mudah-mudahan *nggak* masuk kesimpulan akan dibahas juga.

Terima kasih, Pimpinan.

WAKIL KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M. /WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Baik.

Silakan Bu Menteri.

MENTERI LHK (Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc):

Terima kasih.

Pimpinan dan Anggota yang kami hormati,

Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas hal-hal yang telah disampaikan dan pertemuan kali ini saya merasakan bahwa ternyata masih ada atau masih banyak hal-hal yang secara konseptual kita harus gali dan bangun arahan berikutnya. Setuju dengan catatan yang terhormat Pimpinan tadi bahwa Ibu Anggia bahwa dengan catatan-catatan ini kita berharap bahwa mendapatkan kebaikan yang berguna dan bermanfaat dan sebetulnya mungkin dan sesungguhnya di menjadi harapan masyarakat, jadi saya sekali lagi menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas catatan-catatan. Walaupun kedengarannya amarah dan *nggak enak* buat saya, tapi saya menangkap sesuatu yang sangat baik justru dari hal tersebut.

Saya *take note* atas catatan yang terhormat Ibu Alien terakhir dan memang ini bagian yang paling rumit soal Sultra. Sultra, Papua Freeport, itu untuk lingkungan memang bukan hal yang mudah, jadi kami berikan atensi khusus untuk ini.

Terima kasih Ibu dan Bapak Anggota yang kami hormati, dan Pimpinan yang kami hormati. Kurang lebih mohon maaf atas hal-hal yang kurang pas dari pihak kami.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Shalom,
Om Shanti Shanti Shanti Om.*

WAKIL KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M. /WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Wa'alaikumsalam,

Terima kasih Bapak-Ibu, Bu Menteri, Pak Dirut, semuanya atas semuanya. Mudah-mudahan kita bisa buka bersama di rumah masing-masing.

*Wallahul muwafiq ila aqwamith thariq,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**(KETUK PALU 3 KALI)
(RAPAT DITUTUP PUKUL 14.30 WIB)**

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

Ttd.

Drs. ACHMAD AGUS THOMY
NIP. 196508171988031002